

**BEKERJA BERSAMA
MERANGKUL SEMUA**



**Meratus
Geopark**



**Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 031 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2025-2029
Tanggal 12 September 2025
Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2025 Nomor 31**

Rencana Strategis

**Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan**

2025-2029

**DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat :Jalan. Jend. A. Yani Km.6 No.23 Banjarmasin Kode Pos 70249

Email. nakertranskalsel@yahoo.co.id Website. <http://disnakertrans.kalselprov.go.id>

Wasnaker. wasnaker.provkalsel@gmail.com, HI. hi.jamsosnaker@gmail.com,

P4TK. pkpdisnakertrans@gmail.com, Transmigrasi. ketransmigrasian@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 000.7.6/ 035 /DISNAKERTRANS/2025

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja , mendorong pemerataan kesempatan berusaha mendorong pemerataan pembangunan nasional, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, hal ini dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a konsederan ini, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketrasmigrasian;
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 11. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU

tentang Ketransmigrasian Pembangunan Kawasan Transmigrasi

12. Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
13. Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
14. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 -2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pengolahan data dan informasi
 - b. Menganalisis Gambaran pelayanan perangkat daerah
 - c. Mengevaluasi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
 - d. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

- e. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
- f. Perumusan rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun
- g. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin

Pada Tanggal : 22 Januari 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,


IREAN SAYUTI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19720305 199811 1 001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan ;
Nomor : 000.7.6 / 035 / DISNAKERTRANS / 2025
Tanggal : 22 Januari 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGI TAHUN 2025 – 2029
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- a. Pengarah : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Ketua : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Kalimantan Selatan;
- c. Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;
 3. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan;
 4. Kepala Bidang Ketransmigrasian Provinsi Kalimantan Selatan;
 5. Kepala UPT. Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. Kepala UPT. Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Kepala UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I
 8. Kepala UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II
 9. Kepala UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III
 10. Kepala UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV
 11. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 12. Staf Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



IRFAN SA YUTI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720305 199811 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, yang berfungsi untuk mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan secara lebih terintegrasi, terukur, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan.

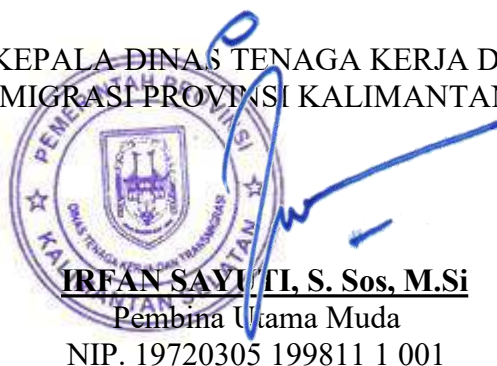
Melalui Renstra ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, memperkuat perlindungan tenaga kerja, serta mendorong pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari kontribusi, dukungan, dan partisipasi berbagai pihak, baik dari internal pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun masyarakat luas. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Renstra ini akan terdapat tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat, sinergi yang erat, serta evaluasi yang berkesinambungan agar semua sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan tenaga kerja yang kompeten serta Terwujudnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



IRFAN SAYUTI, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720305 199811 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis.....	7
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2	Permasalahan Perangkat Daerah.....	46
2.3	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	48
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan.....	54
3.1	Tujuan.....	55
3.2	Sasaran.....	55
3.3	Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029	58
3.4	Arah Kebijakan	59
BAB IV	Program, Kegiatan, SubKegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan	61
	Bidang Urusan.....	
BAB V	Penutup	108
	Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap SKPD wajib membuat rencana strategis dengan mengacu pada Dokumen Ranwal RPJMD dan dengan mempertimbangkan kondisi dan isu strategis masing-masing wilayah.

Sedangkan secara spesifik, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 memiliki fungsi :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang realistis, konsisten dengan visi, misi, dan tupoksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam implementasinya;
2. Menterjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait perkembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;
5. Menyediakan dasar (*benchmark*) untuk mengukur sejauhmana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;
6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan;
7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 dilakukan melalui beberapa tahapan dan tata cara penyusunan Renstra, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari :

1. ***Tahap Persiapan***, yaitu :

- a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029;
- b. Orientasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029;
- c. Penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029.

2. ***Tahap Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029***, meliputi :

- a. Pengumpulan data/informasi kondisi pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. Penyusunan profil pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan prediksi jangka menengah;
- c. Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;
- d. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan;
- e. Perumusan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

3. ***Tahap Penetapan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029***.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka diamanatkan bahwa Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 dan bersifat indikatif.

Operasionalisasi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 yang dituangkan ke dalam berbagai program prioritas dan target kinerja tahunan, selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Kinerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang – undang No. 29 Tahun 2009 Perubahan atas UU No.15/1997 tentang Ketransmigrasian Pembangunan Transmigrasi Berbasis Kawasan;
5. Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang – undang No. 59 Tahun 2024 Tentang RPJPN 2025 – 2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah terkait pelaporan;
12. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU tentang Ketransmigrasian Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
13. Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2018 Tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
14. Peraturan Presiden No. 172 Tahun 2024 Tentang Kementerian Transmigrasi;
15. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi

16. Peraturan Menteri Transmigrasi No 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi tahun 2025 -2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Perda;
19. Peraturan Menteri Transmigrasi No. 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi
20. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
25. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2024 Tentang Penetapan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2024;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045; dan
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
31. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan;
32. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 Tanggal 12 September 2025 Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 31

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran secara operasional visi, misi, fokus program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, yang digambarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara umum, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 berfungsi untuk menjawab pertanyaan menyangkut:

1. Kemana arah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dan apa yang hendak dicapai dalam tahun mendatang;
2. Bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan mencapainya;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan agar tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Lewat pelatihan kerja, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi.
2. Meningkatkan kesempatan kerja dengan memperluas informasi pasar kerja, membuka akses penempatan kerja, serta mendorong wirausaha.
3. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja melalui pengawasan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan perlindungan pekerja migran.
4. Mewujudkan kawasan transmigrasi yang produktif dan berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan warga di dalam kawasan transmigrasi maupun diluar

kawasan transmigrasi, melalui pengembangan berkelanjutan dan pemberdayaan berupa peningkatan keterampilan untuk berwirausaha.

5. Meningkatkan pelayanan publik agar lebih transparan, cepat, akuntabel, dan berbasis teknologi.

1.4 Sistematika Penulisan

- Bab I. Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis serta sistematika penulisan.
- Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis.
- Bab III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab IV. Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Kinerja Penyelenggara SKPD
- Bab V. Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Perangkat Daerah dengan tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi. Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan empat Bidang Teknis yaitu Bidang Pembinaan Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Bidang Ketransmigrasian. Lebih lanjut, demi menjangkau pelayanan kepada masyarakat secara langsung Bidang-bidang Teknis tersebut dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis mengingat luas daerah provinsi Kalimantan Selatan dan tingginya kompleksitas beban kinerja SKPD. Ada beberapa UPTD yang dibawah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan antara lain UPTD Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, UPTD Balai Latihan Kerja dan UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I, II, III dan IV.

Potensi pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Selatan sangat tinggi tidak hanya dilihat dari penyerapan tenaga kerja pada sektor formal tetapi juga pada sektor informal seperti pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mengingat secara demografis provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 13 Kabupaten / Kota dimana masing-masing dari 13 Kabupaten / Kota tersebut memiliki potensi dan karakteristik tersendiri yang perlu didalami lebih jauh mengenai kondisi ketenagakerjaannya. Akan tetapi, masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu segera ditangani bukan saja masalah ketenagakerjaan tetapi juga ketransmigrasian. Permasalahan-permasalahan tersebut juga sangat kompleks yang terutamanya terkait langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, kesempatan kerja, pengembangan usaha, kesenjangan pembangunan antar wilayah, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor sektor perekonomian yang ada.

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, dan aset dan

menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian. Unsur-unsur Organisasi Sekretariat :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas mengelola surat menyurat, ekspedisi, dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan, serta administrasi kepegawaian.

2. Bidang Pembinaan Pelatihan Produktivitas & Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pembinaan Pelatihan Produktivitas & Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pelatihan kerja, pengembangan produktivitas, sertifikasi, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja. Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja adalah :

- a. Seksi Pelatihan Kerja, Pengembangan Produktivitas dan Sertifikasi, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program pelatihan kerja berdasarkan klaster, pemagangan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta sertifikasi tenaga kerja;
- b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, mempunyai tugas memberikan pelayanan antar kerja lintas daerah, perizinan lembaga penempatan tenaga kerja swasta, serta perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri;
- c. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan program ketenagakerjaan secara terpadu yang dapat mendorong perluasan kesempatan kerja.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengaturan syarat kerja serta pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja. Unsur-unsur organisasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah :

- a. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan hubungan kelembagaan, bimbingan teknis fasilitasi negosiasi, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

- b. Seksi Peraturan Syarat Kerja, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengaturan syarat kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- c. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas melaksanakan kerja sama, pembinaan, dan analisa pengembangan pengupahan serta jaminan sosial tenaga kerja.

4. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum ketenagakerjaan. Unsur-unsur organisasi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan adalah:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja;
- b. Seksi Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data-data pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan norma kerja serta norma keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Bidang Ketransmigrasian

Bidang Ketransmigrasian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya kawasan transmigrasi dan pembangunan satuan permukiman baru, pembinaan dan pembangunan satuan permukiman pugar, pembangunan dan penataan satuan permukiman tempatan. Unsur- unsur organisasi bidang ketransmigrasian adalah:

- a. Seksi Pemberdayaan Sumber daya Kawasan Transmigrasi dan Pembangunan Satuan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pencadangan lahan, pembersihan, pengkaplingan, pensertifikatan dan pembangunan permukiman transmigrasi sejumlah yang akan ditempatkan;
- b. Seksi Pembinaan dan Pembangunan Satuan Permukiman Pugar mempunyai tugas membina, menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat transmigran dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi;

- c. Seksi Pembangunan dan Penataan Satuan Permukiman Tempatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi administratif perpindahan peserta transmigrasi dan penempatan di areal bangunan transmigrasi yang telah disediakan.

Untuk Membantu Tugas Pelayanan dimasyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 082 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari :

- (1) **Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja;**
- (2) **Balai Latihan Kerja;**
- (3) **Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I di Kota Banjarmasin;**
- (4) **Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II di Kota Banjarbaru;**
- (5) **Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah III di Kabupaten Balangan;**
- (6) **Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV di Kabupaten Tanah Bumbu.**

Adapun tugas dan fungsi UPT-UPT dimaksud adalah sebagai berikut :

1. UPT Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kegiatan Teknis operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Bidang Pelayanan jasa pengujian, Fasilitasi, supervisi, penyuluhan dan Bimbingan Teknis Higiene perusahaan, ergonomi, kesehatan dan keselamatan kerja

UPT Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja terdiri atas :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Ergonomi dan Keselamatan Kerja;
- (3) Seksi Kesehatan Kerja.

2. UPT Balai Latihan Kerja melaksanakan sebagian tugas :

- a. Mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kerjasama dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- b. Menyusun program, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kerjasama dan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- c. Menyusun program, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kerjasama pemagangan calon tenaga kerja dan pencari kerja;
- d. Menyusun program, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan pelatihan kerja;
- e. Menyusun program, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemasaran, sosialisasi dan penyaluran;

- f. Mengendalikan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan urusa ketatausahaan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

UPT Balai Latihan Kerja :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Seksi Pelatihan / Diklat,
- (3) Seksi Pemasaran;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

1. UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I,II,III dan IV

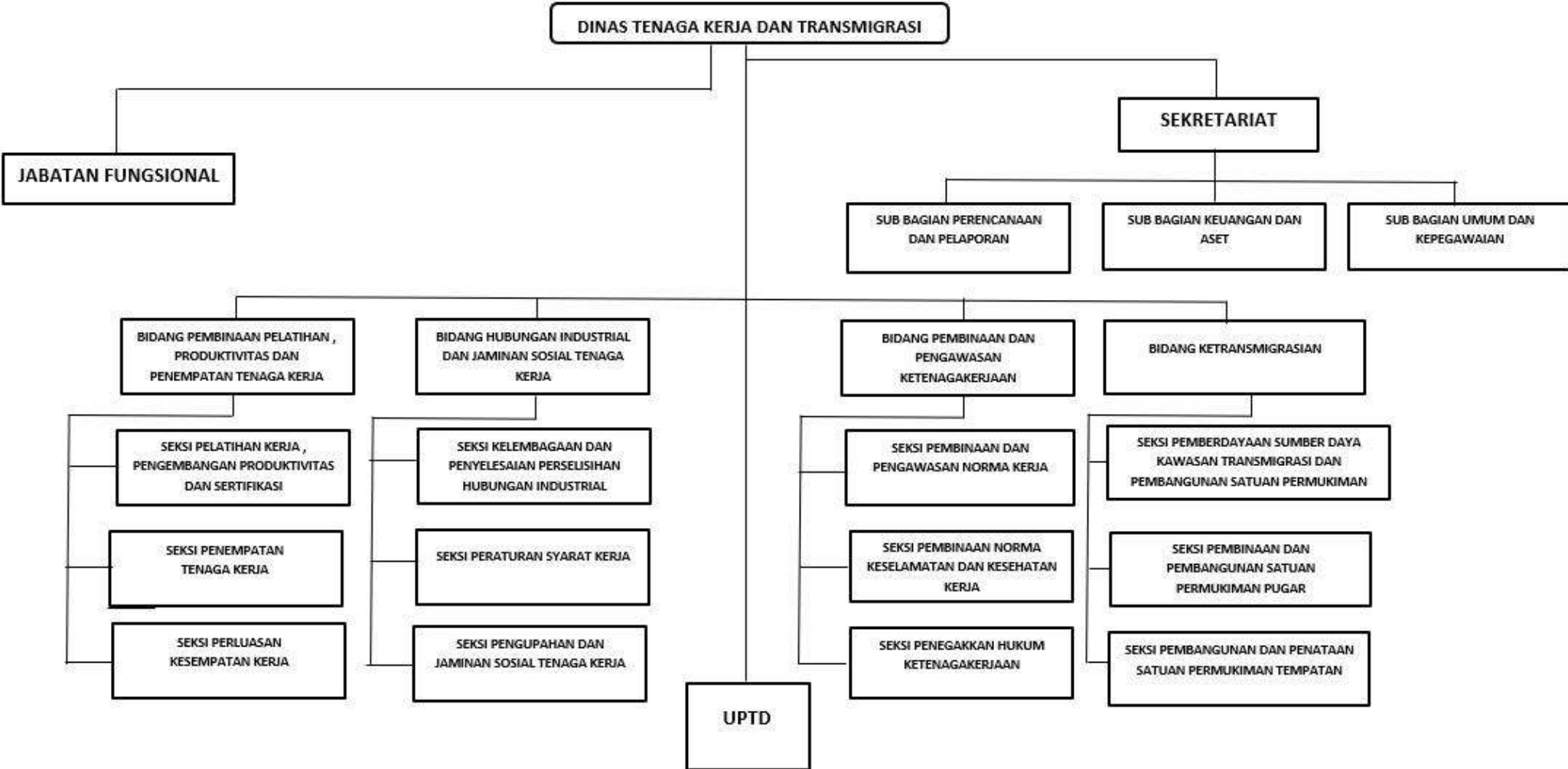
Melaksanakan tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan norma kerja;
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penegakan hukum ketenagakerjaan;
- e. Pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan.

UPT Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I,II,III dan IV terdiri :

- (1) Kepala Balai;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha;
- (3) Jabatan Fungsional.
- (4) Seksi Norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- (5) Seksi Norma Kerja

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Hingga Desember 2024, Jumlah ASN lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan beserta Non ASN berjumlah 312 orang, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1 Jumlah ASN dan Non ASN Lingkup Disnakertrans

No	Uraian	Jumlah ASN	Jumlah Non ASN
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	72	44
2	Balai Latihan Kerja	33	36
3	Lab Keselamatan dan Kesehatan Kerja	16	36
4	Balai Pengawasan Tenaga Kerja Daerah Wilayah I	15	3
5	Balai Pengawasan Tenaga Kerja Daerah Wilayah II	19	7
6	Balai Pengawasan Tenaga Kerja Daerah Wilayah III	12	3
7	Balai Pengawasan Tenaga Kerja Daerah Wilayah IV	11	5
JUMLAH		178	134

Sumber : Disnakertrans Prov Kalsel, 2024

Tabel 2.1.2.2 Jumlah ASN Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Kondisi Desember 2024 Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	%
1	Laki-laki	204	65
2	Perempuan	108	35
JUMLAH		312	100

Sumber : Disnakertrans Prov Kalsel, 2024

Dilihat pada Tabel Jumlah ASN Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan jenis kelamin pada kondisi bulan Desember 2024 sebanyak 312 orang. Jumlah ASN Laki – laki lebih banyak sebesar 65% , Jika dibandingkan dengan Jumlah ASN Perempuan yang hanya sebesar 35%.

Tabel 2.1.2.3.
Jumlah ASN Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan UPTD
Provinsi Kalimantan Selatan
Kondisi Desember 2024 Berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang / Kepala UPTD	11
4	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	33
	Fungsional :	
	1. Arsiparis	1
	2. Pranata Komputer	1
	3. Mediator HI	1
	4. Pengawas Ketenagakerjaan	39
	5. Pengantar Kerja	1
	6. Instruktur	25
	7. Pranata Laboratorium	1
5	Staf	63
6	Honorar	134
Jumlah		312

2. Sarana dan Prasarana

Hingga Desember 2024, jumlah aset tetap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.13
Daftar Aset Tetap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan
beserta UPT Kondisi Hingga Desember 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen km.6	Luas Lantai 2448 M2	Baik
2	Lain – lainnya Bangunan Gedung Kantor	Luas Lantai 255 M2	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Luas Lantai 1485 M2	Baik
4	Rumah Negara Gol II Type A Permanen	Luas Lantai 157 M2	Baik
5	Rumah Negara Gol III Type A Semi Permanen	Luas Lantai 293 M2	Baik
6	Flat / Rumah Susun Permanen	Luas Lantai 1458 M2	Baik
7	Flat / Rumah Susun Permanen – Angsana	Luas Lantai 195 M2	Baik
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen - Angsana	Luas Lantai 2448 M2	Baik
9	Bangunan Puskesmas Pembantu – Angsana	Luas Lantai 180 M2	Baik
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen- Angsana	Luas Lantai 219 M2	Baik
11	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen – Angsana	Luas Lantai 425 M2	Baik
12	Rumah Susun / Lain – Lain Flat – Angsana	Luas Lantai 150 M2	Baik
13	Jeep	1 unit	Baik
14	Minibus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	14 unit	Baik
15	Pick Up	1 unit	Baik
16	Sepeda Motor Roda 2	88 unit	Baik
17	Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya (Multipro Gn/ 7000E MP)	1 unit	Baik
18	Mesin Kalkulator	2 unit	Baik
19	Berangkas	8 unit	Baik
20	Alat penghancur kertas	2 unit	Baik
21	Mesin absensi	2 unit	Baik
22	Display (Toshiba TDP SPI)	1 unit	Baik
23	Papan Pengumuman	10 buah	Baik
24	Perkakas Kantor	2 unit	Baik
25	Meja ½ Biro	5 unit	Baik
26	Kursi Rapat	95 unit	Baik
27	Kursi Tamu	2 unit	Baik
28	Kursi Lipat	14 unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
29	Sofa	2 unit	Baik
30	Meja tulis	2 unit	Baik
31	Gorden	63 unit	Baik
32	Jam Mekanis	1 unit	Baik
33	Vacuum Cleaner	1 unit	Baik
34	A.C Sentral	7 unit	Baik
35	A.C Window	8 unit	Baik
36	A.C Split	41 unit	Baik
37	Televisi	3 unit	Baik
38	Wireless	4 unit	Baik
39	Handy Cam	2 unit	Baik
40	Alat Pemadam	10 unit	Baik
41	Meja Pejabat Esselon III	5 unit	Baik
42	Meja Pejabat Esselon IV	30 unit	Baik
43	Kursi Pejabat Esselon III	5 unit	Baik
44	Kursi pejabat Esselon IV	38 unit	Baik
45	Kursi kerja pegawai	25 unit	Baik
46	Lemari arsip	3 unit	Baik
47	Microphone / Wireless	1 unit	Baik
48	Camera Attachment	2 unit	Baik
49	Proyektor	7 unit	Baik
50	Pelataran Studio Visual	3 unit	Baik
51	Camera	8 buah	Baik
52	Sound System	3 unit	Baik
53	Komputer Jaringan	3 unit	Baik
54	P.C unit	22 unit	Baik
55	Laptop	26 unit	Baik
56	Note Book	40 unit	Baik
57	Printer	48 unit	Baik
58	Printer Brother	5 unit	Baik
59	Scan	1 unit	Baik
60	UPS	7 unit	Baik
61	Server	1 unit	Baik
62	Router	12 unit	Baik
63	Modem	1 unit	Baik

LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 unit	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3 unit	Baik
3	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1 unit	Baik
4	Taman Semi Permanen	1 unit	Baik
5	Jalan Khusus	1 unit	Baik
6	Instalasi PLTD Kapasitas Kecil	1 unit	Baik
7	Jaringan Transmisi Tegangan	2 unit	Baik
8	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	11 unit	Baik
9	Buku Peraturan Perundang-undangan	5 unit	Baik
10	Buku Umum Lain – Lain	195 unit	Baik
11	Buku Agama Islam	11 unit	Baik
12	Buku Agama Lain-Lain	2 unit	Baik
13	Buku Sosiologi	2 unit	Baik
14	Buku Statistik	1 unit	Baik
15	Buku Ekonomi	23 unit	Baik
16	Buku Hukum	9 unit	Baik
17	Buku Ilmu Sosial Lain-Lain	2 unit	Baik
18	Buku Pengetahuan Bahasa Inggris	15 unit	Baik
19	Buku Ilmu Bahasa Lain – Lain	1 unit	Baik
20	Buku Kimia	3 unit	Baik
21	Buku Geologi, Metrologi	1 unit	Baik
22	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam Lain-lain	37 unit	Baik
23	Buku Ilmu Kedokteran	31 unit	Baik
24	Buku Teknologi	1 unit	Baik
25	Buku Management dan Perkantoran	3 unit	Baik
26	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-Lain	109 unit	Baik
27	Buku Musik	2 unit	Baik
28	Buku Seni Budaya	1 unit	Baik
29	Buku Sejarah	1 unit	Baik
30	Buku Geografi, biografi, sejarah Lain – Lain	1 unit	Baik
31	Atlas	1 unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
32	Kendaraan Bermotor Penumpang	2 unit	Baik
33	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2 unit	Baik
34	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 unit	Baik
35	Perkakas Kontruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	1 unit	Baik
36	Transformator	1 unit	Baik
37	Electrical Discharge	1 unit	Baik
38	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1 unit	Baik
39	Perkakas Bengkel Sevice	1 unit	Baik
40	Noise	1 unit	Baik
41	Alat Ukur Universal Lain-lain	1 unit	Baik
42	Alat Pemeriksaan Zat Cair	1 unit	Baik
43	Alat Ukur Lainnya Lain-Lain	1 unit	Baik
44	Alat Timbangan/Biara	2 unit	Baik
45	Lemari Besi/Metal	3 unit	Baik
46	Lemari Kayu	3 unit	Baik
47	Filing Cabinet Besi	7 unit	Baik
48	Brandkas	1 unit	Baik
49	Lemari Kaca	10 unit	Baik
50	Alat Penghancur Kertas	2 unit	Baik
51	Mesin Absensi	1 unit	Baik
52	Papan Nama Instansi	1 unit	Baik
53	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	2 unit	Baik
54	Bangku Panjang Besi/Metal	2 unit	Baik
55	Meja Rapat	20 unit	Baik
56	Meja Panjang	1 unit	Baik
57	Meja 1/2 Biro	10 unit	Baik
58	Kursi Rapat	39 unit	Baik
59	Kursi Lipat	1 unit	Baik
60	Sofa	3 unit	Baik
61	Lemari Es	7 unit	Baik
62	A.C. Sentral	4 unit	Baik
63	A.C. Window	1 unit	Baik
64	A.C. Split	35 unit	Baik
65	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2 unit	Baik
66	Air Curtain	2 unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
67	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya)	2 unit	Baik
68	Unit Power Supply	7 unit	Baik
69	Dispenser	2 unit	Baik
70	Karpet	2 unit	Baik
71	Alat Rumah Tangga Lainnya	4 unit	Baik
72	Pompa Air	1 unit	Baik
73	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik
74	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	31 unit	Baik
75	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	1 unit	Baik
76	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik
77	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	37 unit	Baik
78	Kursi Kerja	1 unit	Baik
79	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	1 unit	Baik
80	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3 unit	Baik
81	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1 unit	Baik
82	Proyektor + Attachment	2 unit	Baik
83	Peralatan Studio Audio Lainnya	3 unit	Baik
84	Camera+ Attachmen	4 unit	Baik
85	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1 unit	Baik
86	Peralatan Studio Video Dan Film Lain-Lain	2 unit	Baik
87	Alat Pengolah Data Studio	4 unit	Baik
88	Intermediate Telephone/Key Telephone	1 unit	Baik
89	Sound System (Alat Komunikasi Telephone)	2 unit	Baik
Ara	Alat Kedokteran Umum	33 unit	Baik
91	Spymanometer	1 unit	Baik
92	Sound Level Meter (Alat Kesehatan Matra Laut)	1 unit	Baik
93	Audiometer (Alat Kesehatan Umum Lain)	2 unit	Baik
94	Incubator	1 unit	Baik
95	Timbangan/Neraca	2 unit	Baik
96	Vacum Pump	3 unit	Baik
97	Stress Cracking Tester With Thermometer Water Bath	1 unit	Baik
98	Spectrophotometer	1 unit	Baik
99	Device (Alat Laboratorium Microbiologi)	1 unit	Baik
100	Desicator	1 unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
101	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	1 unit	Baik
102	Air Sampler (Alat Laboratorium Kimia)	1 unit	Baik
103	Lain-Lain Alat Laboratorium Kimia	1 unit	Baik
104	Alat Laboratorium Kimia Lain-lain	12 unit	Baik
105	Oven	1 unit	Baik
106	Lain-lain Alat Laboratorium Fisika	1 unit	Baik
107	Alat Laboratorium Fisika Lain-Lain	2 unit	Baik
108	Respirometer	1 unit	Baik
109	Water Quality Checker	1 unit	Baik
110	Lux Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)	1 unit	Baik
111	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan Lain-Lain	1 unit	Baik
112	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan Lain-Lain	2 unit	Baik
113	Alat Laboratorium Biologi Perairan	1 unit	Baik
114	Seiz Filter Lengkap Dengan Vacum Pump Dan Blender	3 unit	Baik
115	Multi Glass Meter	4 unit	Baik
116	Alat Pengukur Kadar Air Dengan Electrode	1 unit	Baik
117	Aparatus Dan Stirer	1 unit	Baik
118	Gas Detector	4 unit	Baik
119	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	2 unit	Baik
120	Automatic Pipet Dispenser	1 unit	Baik
121	Furne Hood	1 unit	Baik
122	Cosmotector	4 unit	Baik
123	Unit Alat Laboratorium Lainnya	60 unit	Baik
124	High Volume Air Sampler (Laboratory Safety Equipment)	1 unit	Baik
125	Hight Volume Air Sampler (Radiation Detector)	2 unit	Baik
126	Water Quality Analyzer System	1 unit	Baik
127	Dust Sampler (Alat Laboratorium Kualitas Udara)	2 unit	Baik
127	Air Quality Monitoring System	1 unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
128	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang	1 unit	Baik
129	Osciloscope	2 unit	Baik
130	Vibration Level Meter	3 unit	Baik
131	Noise Dosimeter	1 unit	Baik
132	Environtment Meter	2 unit	Baik
133	Alat laboratorium penunjang Lain-Lain	1 unit	Baik
134	Lux Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	1 unit	Baik
135	Komputer Unit/Jaringan Lain-Lain	3 unit	Baik
136	P.C Unit	28 unit	Baik
137	Lap Top	13 unit	Baik
138	Note Book	7 unit	Baik
139	CPU (Peralatan Mainframe)	2 unit	Baik
140	Printer	15 unit	Baik
141	Monitor	2 unit	Baik
142	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	Baik
143	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	3 unit	Baik
144	Stopwatch	3 unit	Baik
145	Lampu Untuk Menerangi Skala Neraca Pakai Standar	5 unit	Baik
146	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	4 unit	Baik
147	Kursi Rapat	28 unit	Baik
148	Meja Komputer	5 unit	Baik
149	Nakas	2 unit	Baik
150	Kipas Angin	2 unit	Baik
151	Gordyn	140 unit	Baik
152	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 unit	Baik
153	Alat Kedokteran Umum	2 unit	Baik

Sumber Balai Lab K3 Desember 2024

BALAI LATIHAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Bangunan Kantor pemerintah	49.080 M2	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor pemerintah	49.954 M2	Baik
3	Bangunan Gedung Kantor	9 unit	Baik
4	Bangunan Bengkel	7 unit	Baik
5	Bangunan tempat Ibadah	1 unit	Baik
6	Bangunan gedung tempat pertemuan	2 unit	Baik
7	Taman	1 unit	Baik
8	Gedung Pos Jaga Permanen	1 unit	Baik
9	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1 unit	Baik
10	Rumah Negara Golongan II	11 unit	Baik
11	Hotel Permanen	2 unit	Baik
12	Pagar Permanen	1 unit	Baik
13	Compressor	3 unit	Baik
14	Genset	1 unit	Baik
15	Kendaraan Bermotor Penumpang	3 unit	Baik
16	Kendaraan Bermotor Khusus	1 unit	Baik
17	Mesin Bubut	17 unit	Baik
18	Mesin Frais	3 unit	Baik
19	Mesin Ketam	11 unit	Baik
20	Mesin Bor	14 unit	Baik
21	Mesin Gerinda	4 unit	Baik
22	Mesin Rol	2 unit	Baik
23	Mesin Skrup	1 unit	Baik
24	Mesin Las Listrik	13 unit	Baik
25	Mesin Pelubang	1 unit	Baik
26	Mesin Penekuk/Lipat Plat	1 unit	Baik
27	Mesin Pemotong Plat	1 unit	Baik
28	Mesin Bor Tangan	2 unit	Baik
29	Perkakas Konstruksi Logam Yang transportable(berpindah)	9 unit	Baik
30	Battery Charge	1 unit	Baik
31	Genset	35 unit	Baik
32	Perkakas Bengkel Listrik Lainnya	40 unit	Baik
33	Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya	8 unit	Baik
34	Mesin Gergaji	1 unit	Baik

35	Gergaji Chain Saw	1 unit	Baik
36	Perkakas Bengkel Lainnya	5 unit	Baik
37	Perkakas Bengkel Khusus	101 unit	Baik
38	Peralatan Las Listrik	39 unit	Baik
39	Perkakas Pabrik Es	1 unit	Baik
40	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	40 unit	Baik
41	Perkakas Bengkel Listrik	111 unit	Baik
42	Perkakas Bengkel Service	163 unit	Baik
43	Perkakas Pengangkat	3 unit	Baik
44	Tool Kit Set	23 unit	Baik
45	Tool Kit Box	8 unit	Baik
46	Tap Dies	8 unit	Rusak Sedang
47	Engine Stand	6 unit	Baik
48	Perkakas Khusus	111 unit	Baik
49	Perkakas Bengkel Kerja	8 unit	Baik
50	Gunting Plat	1 unit	Baik
51	Peralatan Tukang Kayu	16 unit	Baik
52	Mesin Bor Listrik Tangan	2 unit	Baik
53	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	4 unit	Baik
54	Ultrasonic Cleaner (Alat Ukur Universal)	2 unit	Baik
55	Lain-lain alat Ukur Universal	37 unit	Baik
56	Lain-lain alat Ukur Universal	22 unit	Rusak Sedang
57	Pattem Generator	1 unit	Baik
58	Frequency Counter (Universal Tester)	4 unit	Baik
59	Scanner (Universal Tester)	5 unit	Baik
60	Lain-laian Universal Tester	2 unit	Baik
61	Micro Meter	1 unit	Baik
62	Rak Kayu	9 unit	Baik
63	Filing Cabinet Besi	9 unit	Baik
64	White Board	1 unit	Baik
65	Mesin Absensi	1 unit	Baik
66	LCD Projector/Infocus	4 unit	Baik
67	LCD Monitor	1 unit	Baik
68	Papan Tulis	20 unit	Baik
69	Lain-lain alat kantor lainnya	1 unit	Baik
70	Meja Kerja Besi/Metal	2 unit	Baik
71	Kursi Besi/Metal	16 unit	Baik

72	Meja Rapat	7 unit	Baik
73	Tempat Tidur Besi	60 unit	Baik
74	Meja Panjang	8 unit	Baik
75	Kursi Tamu	1 unit	Baik
76	Kursi Putar	25 unit	Baik
77	Kursi Biasa	16 unit	Baik
78	Bangku Sekolah	171 unit	Baik
79	Meja Komputer	16 unit	Baik
80	Sofa	1 unit	Baik
81	Meja Rias	8 unit	Baik
82	Meja Tulis	14 unit	Baik
83	Meja Makan	20 unit	Baik
84	Lemari Kayu	3 unit	Baik
85	Lemari Rias	1 unit	Baik
86	Gordyn	2 unit	Baik
87	Lain-lain Meubelair	134 unit	Baik
88	Alat Pembersih	5 unit	Baik
89	A.C. Window	2 unit	Baik
90	A.C. Split	62 unit	Baik
91	A.C. standing	1 unit	Baik
92	Kipas Angin	3 unit	Baik
93	Televisi	2 unit	Baik
94	Sound System (Alat Rumah Tangga Lainnya /Home Use)	1 unit	Baik
95	Wireless	2 unit	Baik
96	Mesin Jahit	48 unit	Baik
97	Seterika	4 unit	Baik
98	Mesin Obras	3 unit	Baik
99	Mesin Pelubang Kancing	2 unit	Baik
100	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 unit	Baik
101	Lain-lain Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 unit	Baik
102	Alat Rumah Tangga Lainnya	394 unit	Baik
103	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	46 unit	Baik
105	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 unit	Baik

106	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	31 unit	Baik
107	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4 unit	Baik
108	Audio Mixing Portable	1 unit	Baik
109	Audio Amplifier	1 unit	Baik
110	Modulation Monitor Speaker Kabaret	2 unit	Baik
111	Microphone/Wireless MIC	1 unit	Baik
112	Camera Attachment	2 unit	Baik
113	Proyektor + Attachment	9 unit	Baik
114	CCTV	2 unit	Baik
115	Peralatan Studio Visual	5 unit	Baik
116	Camera Digital	1 unit	Baik
117	Rak Peralatan	1 unit	Baik
118	Camera Film	1 unit	Baik
119	Lensa Kamera	1 unit	Baik
120	Sound System (alat komunikasi dan telephone)	4 unit	Baik
121	Lain-lain alat komunikasi telephone	1 unit	Baik
122	Unit Tranceiver UHF Portable	3 unit	Baik
123	Lain-lain Alat Komunikasi Radio UHF	1 unit	Baik
124	Dial & Test Indikator	1 unit	Baik
125	Dial & Test Indikator	4 unit	Rusak Sedang
126	Alat Ukur Sudut	4 unit	Baik
127	Microscope	1 unit	Baik
128	Digital Storage Oscilloscope	1 unit	Baik
129	Audio Generator	4 unit	Baik
130	Osilloscope	1 unit	Baik
131	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	2 unit	Baik
132	Boring & Milling Machine	2 unit	Baik
133	Surface Grinding Machine	1 unit	Baik
134	Tool Grinder Machine	2 unit	Baik
135	Band Saw Machine	2 unit	Baik
136	Mesin Strika Uap	1 unit	Baik
137	Vernier Calliper (Alat Laboratorium Pertanian)	4 unit	Baik
138	Protector	1 unit	Baik
139	Multimeter (Alat Laboratorium Lain)	12 unit	Baik
140	Alat General Laboratory Tool	4 unit	Baik
141	Busur Derajat	1 unit	Baik
142	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi	28 unit	Baik

	Ketrampilan		
143	Alat Peraga Kejuruan	11 unit	Baik
144	DC Power Supply	4 unit	Baik
145	Function Generator (Modular Counting And Scientific Electronic)	4 unit	Baik
146	Logic Pulser	8 unit	Baik
147	Soldering and Desoldering	8 unit	Baik
148	Alat Laboratorium Penunjang	22 unit	Baik
149	Turning Tool Grinding Machine	8 unit	Rusak Sedang
150	Permesinan : Precision Mechanical Workshop	32 unit	Baik
151	Permesinan : Precision Mechanical Workshop	20 unit	Rusak Sedang
152	Digital & Analog Oscilloscope	4 unit	Baik
153	P.C Unit	119 unit	Baik
154	Lap Top	9 unit	Baik
155	Note Book	15 unit	Baik
156	Tablet PC	1 unit	Baik
157	Lain-lain Peralatan Personal Komputer (komputer unit)	2 unit	Baik
158	Printer	15 unit	Baik
159	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20 unit	Baik
160	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	Baik
161	Lain-lain Peralatan Personal Komputer (peralatan komputer)	2 unit	Baik
162	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1 unit	Baik
163	Buku Umum	2 unit	Baik
164	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	2 unit	
165	Lain-lain Software	17 unit	Baik

BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Mini Bus	1 unit	Baik
2	Pick Up	1 unit	Baik
3	Sepeda Motor	2 unit	Baik
4	Sofa	1 unit	Baik
5	A.C. Split	4 unit	Baik
6	Kipas Angin	5 unit	Baik
7	Televisi	1 unit	Baik
8	Unit Power Supply	3 unit	Baik
9	Meja Kerja Pejabat	7 unit	Baik
10	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	15 unit	Baik
11	Kursi Kerja	12 unit	Baik
12	Alat Pengolah Data Studio	1 unit	Baik
13	Lap Top	7 unit	Baik
14	Note Book	2 unit	Baik
15	Personal Komputer Lain-Lain	2 unit	Baik
16	Printer	4 unit	Baik
17	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	Baik

BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	839 M2	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	312 M2	Baik
3	Jaringan Distribusi Listrik	312 M2	Baik
4	Taman	1 unit	Baik
5	Portable Generating Set	2 unit	Baik
6	Kendaraan Bermotor Penumpang	1 unit	Baik
7	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1 unit	Baik
8	Tool Kit Set	1 unit	Baik
9	Lemari Besi/Metal	1 unit	Baik
10	Filing Cabinet Besi	7 unit	Baik
11	Brandkas	2 unit	Baik
12	Overhead Projector	1 unit	Baik
13	Papan Nama Instansi	1 unit	Baik

14	Lain-lain alat kantor lainnya	1 unit	Baik
15	Meja Rapat	5 unit	Baik
16	Meja 1/2 Biro	15 unit	Baik
17	Kursi Tamu	1 unit	Baik
18	Kursi Putar	2 unit	Baik
19	Meja Komputer	4 unit	Baik
20	Kursi Tangan	17 unit	Baik
21	Lain-lain Meubelair	2 unit	Baik
22	A.C. Split	9 unit	Baik
23	Televisi	2 unit	Baik
24	Dispenser	1 unit	Baik
25	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 unit	Baik
26	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil	4 unit	Baik
27	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 unit	Baik
28	Proyektor + Attachment	3 unit	Baik
29	Facsimile	1 unit	Baik
30	Sound System (alat komunikasi dan telephone)	1 unit	Baik
31	Lap Top	3 unit	Baik
32	Note Book	1 unit	Baik
33	Printer	1 unit	Baik
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 unit	Baik
35	Jam Ukur (Meet Lock)	2 unit	Baik
36	Tiang Penyangga Tong Sampah	1 unit	Baik
37	Kabei listrik	2 unit	Baik
38	Lambang Negara (Garuda)	2 unit	Baik
39	Gambar Presiden	1 unit	Baik
40	Gambar Wakil Presiden	1 unit	Baik

**BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	3.000 M2	Baik
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	1 unit	Baik
3	A.C. Split	2 unit	Baik
4	P.C Unit	1 unit	Baik
5	Note Book	2 unit	Baik
6	Printer	1 unit	Baik

**BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI
1	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	4.950 M2	Baik
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	1 unit	Baik
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1 unit	Baik
4	Lemari Besi / Metal	3 unit	Baik
5	Filing Cabinet Besi	4 unit	Baik
6	Sofa	1 unit	Baik
7	A.C .Split	2 unit	Baik
8	Televisi	1 unit	Baik
9	Dispenser	1 unit	Baik
10	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1 unit	Baik
11	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5 unit	Baik
12	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8 unit	Baik
13	Lain - lain Kursi Rapat Pejabat	1 unit	Baik
14	Slide Projector	1 unit	Baik
15	Intermediate Telephone / Key Telephone	3 unit	Baik
16	Telephone Mobile	1 unit	Baik
17	Microphone (alat komunikasi dan telephone)	2 unit	Baik
18	PC Unit	3 unit	Baik
19	Laptop	5 unit	Baik
20	Note Book	1 unit	Baik
21	Printer	3 unit	Baik
22	Telex	2 unit	Baik

Selain Aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jenis layanan (unit usaha) yang berkontribusi bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Unit Usaha untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut :

1. Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang memberikan layanan pengujian peralatan K3 dan kesehatan tenaga kerja bagi perusahaan dengan kelompok sasaran perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan
2. Lapangan Olahraga
3. Kantin

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berdaya saing. Melalui penyelenggaraan pelayanan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkomitmen untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif serta mendukung keberhasilan program transmigrasi yang berkelanjutan.

Dalam bidang ketenagakerjaan, pelayanan difokuskan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi, perluasan kesempatan kerja melalui fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta perlindungan hak-hak normatif pekerja. Selain itu, perangkat daerah juga mendorong kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk menyelaraskan kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi tenaga kerja lokal.

Sementara itu, dalam bidang transmigrasi, pelayanan diarahkan untuk mendukung mobilitas penduduk secara terencana ke wilayah-wilayah pengembangan, dengan tujuan pemerataan pembangunan, pengurangan kepadatan penduduk, dan peningkatan kesejahteraan keluarga transmigran. Perangkat daerah melaksanakan fasilitasi penyiapan lahan, infrastruktur permukiman, serta pembinaan sosial dan ekonomi bagi transmigran agar mampu beradaptasi dan berkembang di lokasi baru.

Seluruh pelayanan ini dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dengan komitmen kuat dan kerja sama lintas sektor, perangkat daerah terus berupaya menjadi mitra strategis dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan mengembangkan wilayah transmigrasi yang berdaya saing, sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalsel :

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pencaker yang mendapatkan pekerjaan	100%	100%	n/a	n/a	n/a	23,26%	22,89%	n/a	n/a	n/a
2	Persentase Pencaker yang kompeten	100%	100%	n/a	n/a	n/a	43,33%	11,41%	n/a	n/a	n/a
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100%	100%	21,33%	21,43%	21,53%	54%	63,6%	22%	23%	23,29%
4	Persentase angkatan kerja yang bekerja	100%	100%	n/a	n/a	n/a	92,26%	95,04%	n/a	n/a	n/a
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	n/a	100%	6,2%	6,23%	6,24%	n/a	100%	6,8%	7,17%	7,36%
6	Persentase LPK / kejuruan pelatihan yang telah terakreditasi	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	6%	n/a	n/a	n/a
7	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	n/a	n/a	24,8%	26,03%	27,21%	n/a	n/a	33,33%	47,43%	45,74%
8	Persentase penyelesaian hubungan industrial	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
9	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar BPJS)	n/a	n/a	11,49%	12,48%	13,47%	n/a	n/a	10,30%	13,40%	33,77%
10	Persentase perusahaan yang mendapatkan penghargaan K3	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	28%	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Persentase perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	91,45%	n/a	n/a	n/a
12	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	100%	100%	n/a	n/a	n/a	95%	90%	n/a	n/a	n/a
13	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	n/a	n/a	18,96%	22,21%	24,99%	n/a	n/a	27,85%	69%	69,42%
14	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang MANTAP (Maju, Nyaman, Terampil dan Produktif)	11 SP	n/a	n/a	n/a	n/a	0 SP	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
15	Jumlah satuan permukiman Transmigrasi yang mandiri	n/a	9 SP	100%	n/a	n/a	n/a	9 SP	100%	n/a	n/a
16	Persentase sisa areal HPL yang dapat dikembangkan oleh Pemda	n/a	n/a	20%	n/a	60%	n/a	n/a	175%	n/a	100%
17	Persentase satuan permukiman Transmigrasi yang mandiri	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a
18	Persentase satuan permukiman yang difasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	100%
19	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%	100%
20	Nilai SAKIP Disnakertarns Prov. Kalsel	80,20	n/a	n/a	n/a	n/a	81,12	n/a	n/a	n/a	n/a
21	Persentase serapan anggaran Disnakertrans Prov. Kalsel	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	96.92%	n/a	n/a	n/a	n/a
22	Persentase aset yang tercatat Disnakertrans Prov. Kalsel	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
23	Nilai IKM	n/a	n/a	n/a	85	n/a	n/a	n/a	n/a	88	n/a

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
24	Jumlah Inovasi pelayanan Publik yang diterapkan	n/a	n/a	n/a	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	n/a
25	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	n/a	n/a	n/a	100 poin	100 poin	n/a	n/a	n/a	100 poin	100 poin
26	Nilai Komponen perencanaan pada LKIP SKPD	n/a	27,40	27,50	27,50	29,05	n/a	28,55	28,55	25,50	25,50
27	Persentase pemenuhan terkait saptas dan kepegawaian disnakertarns prov. Kalsel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	Persentase ASN Disnakertarns Prov. Kalsel yang memiliki sertifikat ke ahlian	10%	n/a	n/a	n/a	n/a	10%	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Persentase pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%
30	Jumlah data yang disusun	n/a	4 data	4 data	4 data	4 data	n/a	4 data	4 data	4 data	4 data
31	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	100%	n/a	100%	9,87%	55,39%	54%	n/a	83%	61,70%	61,32%
32	Persentase LPK / kejuruan	n/a	100%	n/a	n/a	24,45%	n/a	6%	n/a	n/a	100%

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	pelatihan yang telah terakreditasi										
33	Persentase penganggur yang dilatih	n/a	n/a	0.03%	n/a	n/a	n/a	n/a	4,51%	n/a	n/a
34	Persentase Pencaker yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	63,6%	n/a	n/a	n/a
35	Persentase TK yang memiliki tingkat produktivitas yang baik	n/a	100%	n/a	100%	100%	n/a	100%	n/a	100%	85%
36	Persentase wirausaha baru yang dilatih	n/a	100%	100%	44,44%	50%	n/a	33,33%	100%	75%	84,55%
37	Persentase angkatan kerja yang bekerja	100%	100%	95,26%	95,45%	95,63%	92,26%	95,04%	95,26%	95,69%	95,80%
38	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang terlayani	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%
39	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	n/a	100%	n/a	12,48%	n/a	n/a	6,8%	n/a	13,40%	n/a

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
40	Persentase perusahaan yang memiliki SP, SB, HI dan Jamsostek	100%	100%	n/a	n/a	n/a	100%	6,8%	n/a	n/a	n/a
41	Persentase perusahaan yang memiliki PP dan PKB	n/a	n/a	30%	n/a	n/a	n/a	n/a	16,07%	n/a	n/a
42	Persentase perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP)	n/a	n/a	n/a	2,18%	2,58%	n/a	n/a	n/a	6,57%	7,28%
43	Persentase perusahaan yang memiliki PKB	n/a	n/a	n/a	1,08%	1,47%	n/a	n/a	n/a	2,23%	2,3%
44	Persentase perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator HI	n/a	n/a	60%	21,40%	23,56%	n/a	n/a	100%	86%	59%
45	Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	n/a	n/a	n/a	1,24%	1,67%	n/a	n/a	n/a	1,94%	2,22%
46	Persentase Kenaikan UMP dan UMK	n/a	8%	8%	8,35%	8,40%	n/a	1%	8%	4%	6,5%
47	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS	n/a	n/a	n/a	n/a	24,38%	n/a	n/a	n/a	n/a	56,10%

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Ketenagakerjaan										
48	Persentase peningkatan perusahaan yang taat aturan ketenagakerjaan	10%	10%	n/a	n/a	10%	6%	15%	n/a	n/a	1,4%
49	Persentase angka nihil kecelakaan kerja	100%	n/a	n/a	n/a	n/a	100%	n/a	n/a	n/a	n/a
50	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan pembinaannya	n/a	9 SP	3 SP	3 SP	3 SP	n/a	9 SP	3 SP	3 SP	3 SP
51	Jumlah luas sisa lahan pencadangan di dalam HPL	n/a	n/a	2000 hektar	n/a	350 HPL	n/a	n/a	3.500 hektar	n/a	350 HPL
52	Jumlah Bid kimtrans yang diusahakan penerbitan sertifikatnya	1500 bid lahan	n/a	n/a	n/a	n/a	0 bid lahan	n/a	n/a	n/a	n/a
53	Jumlah kelembagaan ekonomi dan sosbud yang dikembangkan di Kimtrans	4 lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a	0 lembaga	n/a	n/a	n/a	n/a

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan publik yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Untuk memastikan efektivitas dan tepat sasaran, seluruh program dan layanan yang dilaksanakan difokuskan pada kelompok-kelompok sasaran utama yang telah dipetakan secara strategis.

Dalam bidang ketenagakerjaan, kelompok sasaran layanan meliputi:

1. Pencari Kerja, terutama terutama lulusan baru dan angkatan kerja muda, yang membutuhkan akses terhadap informasi pasar kerja

Foto Kegiatan Job Fair Tahun 2024



2. Pelatihan keterampilan, bimbingan karier, fasilitasi penempatan kerja, Tenaga Kerja Aktif, baik di sektor formal maupun informal, yang memerlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi, serta perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan mereka.

Foto Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna Desa Bincau Muara kabupaten banjar tanggal 16 s/d 18 Mei 2024



Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi



Kejuruan Teknisi Mekanik Alat Berat



Kejuruan Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana



Penyuluhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan



3. Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan calon PMI yang memerlukan layanan pendampingan, pelatihan pra-pemberangkatan, dan perlindungan hukum.

Fasilitasi Pemulangan 5 (lima) CPMI Korban Penempatan Non Prosedural di Batam Hasil Pencegahan



4. Perusahaan atau Dunia Usaha, yang menjadi mitra dalam penyerapan tenaga kerja, pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan industri, serta kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Kegiatan Temu Pelanggan



Pemeriksaan Kesehatan Kerja



Sementara itu, dalam bidang transmigrasi, kelompok sasaran utama terdiri dari:

1. Pembinaan warga transmigran agar dapat mandiri dan berkontribusi terhadap pembangunan wilayah transmigrasi.

**peningkatan keterampilan budidaya jamur tiram di lokasi eks kimtrans
nelayan angšana kabupaten tanah bumbu**



Dengan pendekatan berbasis kebutuhan kelompok sasaran tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat peranannya sebagai institusi pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan proaktif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan wilayah.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberi layanan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan menjalin sinergi yang erat dengan berbagai mitra strategis. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas program, serta memastikan keberlanjutan dampak positif bagi masyarakat.

Di bidang ketenagakerjaan, mitra utama meliputi:

1. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana teknis di wilayah masing-masing, yang berperan penting dalam menyampaikan layanan langsung kepada masyarakat, termasuk fasilitasi pelatihan dan penempatan kerja.
2. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Balai Latihan Kerja (BLK), baik milik pemerintah maupun swasta.
3. Dunia Usaha dan Industri, sebagai pengguna utama tenaga kerja, yang menjadi mitra dalam penyelarasan kurikulum pelatihan, pemagangan, rekrutmen / Job Fair, dan penerapan standar ketenagakerjaan.
4. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dalam memastikan perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk program jaminan kecelakaan kerja, pensiun, dan layanan kesehatan.

5. Lembaga Pendidikan, khususnya SMK dan perguruan tinggi, dalam menyiapkan SDM yang siap kerja melalui integrasi program vokasi dan pelatihan.

Sementara itu, dalam bidang transmigrasi, mitra kerja meliputi:

1. Perangkat daerah Kabupaten yang membidangi Ketransmigrasian sebagai pelaksana teknis di kawasan transmigrasi;
2. Pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan Ekonomi;
3. Perusahaan – perusahaan yang berada didalam kawasan transmigrasi dapat memberikan bantuan CSR kepada masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi tanggung Jawab perangkat daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan selatan melalui Balai Latihan Kerja Prov. Kalsel pada Tahun 2024 telah melakukan kerjasama dengan Pihak ke 3 (tiga) , Adapun Daftar Kerjasama tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

DAFTAR KERJASAMA Balai Latihan Kerja DENGAN PIHAK KE-3

No.	KETERANGAN	No. PKS	TENTANG	TANGGAL	JANGKA WAKTU
1	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Yayasan Hasnur Centre	No.: 10/KSB-KSBUS/PEMOTDA/2023 No.: 563/HC/KU-SK/V/2023	Pembangunan daerah dan Pelayanan Publik	15 Mei 2023 sd 15 Mei 2028	5 tahun
2	PKS Antara ULM Kalimantan Selatan dengan CV. Dejavu Kreasi Indonesia	No.: 029/UN8.1.2.4.2/LL/2024 No.:DIR.PKS/005/6/2024	Kegiatan Pelatihan Pembelajaran Vokasi	06 Mei 2024 sd 06 Mei 2028	4 tahun
3	PKS Antara UIN Antasari Banjarmasin dengan CV. Dejavu dan BLK Prov. Kalsel	No. : 26/Un.14/II.2/HM.01/06/2024 No. : DIR.PKS/006/7/2024 No. : 500.15/520/BLK/2024	Kegiatan pelatihan kejuruan desain grafis, tata kecantikan, menjahit dan teknik listrik	05 Juli 2024 sd 05 Juli 2025	1 tahun
4	PKS Antara PT. Antang Gunung Meratus dengan CV. Dejavu dan BLK Prov. Kalsel	No. : 135/AGM-DKI/LEG/CSR/XI/2024 No. : 023/DJV/RENT/EO No. : 500.15/1292/BLK/2024	Kegiatan pelatihan kejuruan menjahit pakaian dasar	23 September 2024 sd 23 September 2025	1 tahun
5	PKS Antara PT. Arutmin Indonesia Site Satui dengan Koperasi Jasa Satui Mitra Lestari (SMILE) dan BLK Prov. Kalsel	No.: 001/PKS-SMILE/X/2024 No.: 500.15/1293/BLK/2024	Kegiatan pelatihan kejuruan plate welder (Las)	21 Oktober 2024 sd 21 Oktober 2025	1 tahun

6	PKS Antara PT. Wahana Baratama Mining dengan CV. Dejavu dan BLK Prov. Kalsel	No.:066/WBM/CD/XI/2024 No. : 044/DJV/RENT/EO No. : 500.15/1677/BLK/2024	Kegiatan pelatihan kejuruan AC Resindential	21 Oktober 2024 sd 21 Oktober 2025	1 tahun
7	PKS Antara Fave Hotel Banjarbaru dengan BLK Prov. Kalsel	No.: PK.563/236/BLK/2023 No.: 006/HR/XI/2023	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	06 Desember 2023 sd 06 Desember 2025	2 tahun
8	PKS Antara PT. Putra Sarana Transborneo dengan BLK Prov. Kalsel	No.: PK.563/248/BLK/2023 No.: 001/PST/HC/PKS/XI/2023	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	06 Desember 2023 sd 06 Desember 2025	2 tahun
9	PKS Antara Rattan Inn Hotel Banjarmasin dengan BLK Prov. Kalsel	No.: PK.563/235/BLK/2023 No.: 001/RTN-/PKS/XI/2023	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	06 Desember 2023 sd 06 Desember 2025	2 tahun
10	PKS Antara Astra Daihatsu Banjarmasin dengan BLK Prov. Kalsel	No.: PK.563/237/BLK/2023 No.: 001/D730/PKS/D730-BLKP/XII/2023	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	06 Desember 2023 sd 06 Desember 2025	2 tahun
11	PKS Antara Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin dengan BLK Prov. Kalsel	No.: PK.563/249/BLK/2023 No.: W.19.IMI.IMI.1.UM.01.01-4201	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	06 Desember 2023 sd 06 Desember 2025	2 tahun
12	PKS antara BLK Prov. Kalsel dengan Fave Hotel Ayani Banjarmasin	No.: 500.15/1691/BLK/2024 No.: 465.FHAYB.LO.HR.XI.2024	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	18 November 2024 sd 18 November 2025	1 tahun

13	PKS antara BLK Prov. Kalsel dengan GAPKI Kalimantan Selatan	No.: 500.15/1694/BLK/2024 No.:/GAPKI-KS/XI/1024	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	18 November 2024 sd 18 November 2025	1 tahun
14	PKS antara BLK Prov. Kalsel dengan Fugo Hotel Banjarmasin	No.: 500.15/1693/BLK/2024 No.: 118/ENC-MOU/XI/2024	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	18 November 2024 sd 18 November 2025	1 tahun
15	PKS antara BLK Prov. Kalsel dengan Kindai Bestworld Hotel Banjarmasin	No.: 500.15/1693/BLK/2024 No.: 641/HRD/SKK-BWKH/IX/2024	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	18 November 2024 sd 18 November 2025	1 tahun
16	PKS antara BLK Prov. Kalsel dengan Galaxy Hotel Banjarmasin	No.: 500.15/ 1779 /BLK/2024 No.: 1308/MOU-XI/HR/HRM/2024	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	18 November 2024 sd 18 November 2025	1 tahun
17	PKS antara BLK Prov. Kalsel dengan PT. Antang Gunung Meratus	No.: 500.15/ 1780 /BLK/2024 No.:	Penyelenggaraan pemagangan (on the Job Training)	18 November 2024 sd 18 November 2025	1 tahun

2.2 Permasalahan

2.2.1. Permasalahan

Ketenagakerjaan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang menjadi salah satu tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting yang menjadi penentu atau faktor pendukung dari target-target indikator kinerja pembangunan daerah lainnya. Bisa dikatakan bahwa setiap sektor tentu akan membutuhkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan sektoral lainnya. Oleh karena itu sudah seharusnya urusan ketenagakerjaan mendapatkan perhatian yang lebih oleh berbagai pihak.

Transmigrasi juga merupakan tugas pokok dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dimana ini menjadi urusan pilihan daerah untuk terus dikembangkan demi mencapai pemerataan jumlah penduduk. Transmigrasi menjadi penting untuk dilaksanakan karena berperan dalam mengembangkan kawasan yang semula tidak produktif menjadi lebih berkembang dikarenakan banyak kegiatan – kegiatan produktifitas yang bisa dilakukan oleh warga transmigran. Transmigrasi juga berperan secara tidak langsung dalam penyerapan tenaga kerja pada Sektor Pertanian dan Perkebunan.

Dari data diatas dapat dilihat Kondisi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian serta dapat dipetakan permasalahan untuk menentukan Prioritas dan sasaran perangkat Daerah.

Tabel Identifikasi Permasalahan Bidang Tenaga Kerja

Faktor Penyebab	Kondisi yang diperlukan
1. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja;	1. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja;
2. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja;	2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja;
3. Belum luasnya kesempatan tenaga kerja;	3. Meningkatnya kesempatan dan penempatan tenaga kerja;
4. Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja; dan	4. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja; dan
5. Belum optimalnya kualitas pengawasan hak – hak dasar dan norma tenaga kerja.	5. Meningkatnya kualitas pengawasan hak – hak dasar dan norma tenaga kerja

Tabel 2.2.12 Identifikasi Permasalahan Bidang Transmigrasi

Faktor Penyebab	Kondisi yang diperlukan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya lahan yang memiliki kriteria clean dan clear (2C) dan layak huni, Layak Usaha dan layak berkembang; dan 2. Belum optimal pengelolaan kawasan transmigrasi dan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan transmigrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelesaian permasalahan pertahanan di kawasan transmigrasi; dan 2. Meningkatkan potensi sumber daya di Kawasan transmigrasi

2.3 Isu Strategis

Dalam penentuan isu-isu strategis perlu merangkum semua faktor yang saling terkait dimulai dari tugas fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Selatan, Visi Misi Kepala Daerah, telaahan renstra kementerian maupun kabupaten/kota, dan pola tata ruang dan wilayah. Beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan program-program kegiatan antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Teknik Isu strategis Pemerintah daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BIDANG TENAGA KERJA :					
	1. Menurunnya Angka Partisipasi angkatan kerja	PILAR SOSIAL :				Kurangnya kesempatan kerja
	- Tingkat pendidikan tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP	(TPB 1) Tanpa Kemiskinan				Kurangnya perlindungan terhadap pekerja
	- Hanya sedikit pekerja berlatar belakang pendidikan SMK, padahal SMK dirancang untuk mencetak tenaga kerja siap kerja	(TPB 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera				
	- Kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan ekonomi global	(TPB 4) Pendidikan Berkualitas				
	2. Ketidaksiharian antara keahlian dan kebutuhan pasar kerja	(TPB 5) Kesetaraan Gender				
	- Lapangan kerja yang tersedia tidak sesuai	PILAR EKONOMI :				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dengan keahlian SDM yang ada					
	- Kurangnya pemetaan proyeksi kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang	(TPB 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
	3. Pengangguran dan setengah pengangguran					
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada agustus 2024 sebesar 4,20%					
	- Masih adanya masalah setengah pengangguran yang perlu ditangani					
	4. Permasalahan Upah dan Kesejahteraan Pekerja					
	- Adanya kasus-kasus terkait PHK dan permasalahan upah					
	- Tuntutan kenaikan upah minimum dari para buruh					
	5. Kurangnya Pelatihan bagi angkatan kerja untuk berwirausaha					
	- Wirausaha baru kurang berkembag					
	- Belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk					
	- kewirausahaan					
BIDANG TRANSMIGRASI :						

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terbatasnya lahan yang memiliki kriteria clean and clear (2C) dan layak huni, layak usaha dan layak berkembang (3L)	PILAR SOSIAL :				Kurangnya inventarisir di daerah untuk memetakan Kawasan transmigrasi
	Rendahnya aspek legalitas dalam kepemilikan lahan transmigrasi	(TPB 1) Tanpa Kemiskinan				Kurang berkembangnya kawasan transmigrasi
	Belum Optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi dan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan transmigrasi	(TPB 2) Tanpa Kelaparan				
	Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya sosial budaya dan sumber daya alam dalam pengembangan kawasan transmigrasi	(TPB 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera				
	Belum optimalnya mengantisipasi perkembangan teknologi digital secara optimal untuk produksi, pengolahan, pembiayaan dan pemasaran	(TPB 4) Pendidikan Berkualitas				
	Belum berkembangnya peningkatan nilai tambah dan industri kreatif	(TPB 5) Kesetaraan Gender				
	Belum dilakukannya pendekatan klaster yang berbasis komoditas unggulan dalam pengembangan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi	PILAR LINGKUNGAN :				
	Belum optimalnya pengembangan kelembagaan di kawasan transmigrasi	(TPB 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak				
	Belum optimalnya dukungan pemangku kepentingan (lintas sektor, Pemda, swasta, dan lembaga masyarakat) dalam sinergi program pembangunan,	(TPB 7) Energi Bersih dan Terjangkau				

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	maupun pengembangan kawasan transmigrasi					
	Belum optimalnya revitalisasi dan rehabilitasi sarana maupun parasarana yang ada di kawasan transmigrasi	(TPB 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi				
	Masih rendahnya investasi dunia usaha di kawasan transmigrasi	(TPB 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur				
		(TPB 10) Berkurangnya Kesenjangan				

Tabel sesuai Inmen No. 2

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Pada pilar ekonomi yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Salah satu indikator Sdgs yang mendukung bidang Ketenagakerjaan adalah **“cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan nasional bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)”**. Indikator ini bertujuan untuk melindungi hak – hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan bahaya. Adapun metode penghitungannya :

Rumus :

$$CKPBPU = \frac{\text{Jumlah peserta PBPU}}{\text{Jumlah semesta PBPU}} \times 100\%$$

Manfaatnya, yaitu semakin tinggi persentase cakupan kepesertaan pekerja bukan penerima upah (PBPU) jaminan sosial ketenagakerjaan nasional menunjukkan semakin tinggi perlindungan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja terhadap resiko pekerjaan. Paling sedikit mencakup perlindungan terhadap resiko- resiko seperti kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, cacat dan kematian, terhadap resiko tersebut, Jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan perlindungan kesehatan dan finansial.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sehubungan dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden terbaru yang dimana memiliki 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat didukung dengan 320 program kerja.



Bersamaan dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan maka adanya perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana mendukung sinergi terhadap pencapaian visi, misi dan program / 10 janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Pada dokumen RKPD memiliki arah kebijakan pembangunan daerah dan tema prioritas nasional, yaitu :

1. Penguatan Sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan
2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem
4. Pengendalian inflasi di daerah
5. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
6. Dukungan swasembada pangan

Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, dengan melihat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih **H. Muhidin** dan **Hasnuryadi Sulaiman** dijelaskan bahwa VISI Gubernur Kalimantan Selatan adalah

“ KALSEL BEKERJA ”

(Kalimantan Selatan Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera)

Menuju Gerbang Logistik Kalimantan

Dalam rangka pencapaian Visinya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan 5 [lima] Misi yaitu :

Misi 1	Pembangunan Manusia yang unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia
Misi 2	Pembangunan Infrastruktur yang handal
Misi 3	Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan, merata dan syariah
Misi 4	Penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim
Misi 5	Tata Kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat

Memperhatikan keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan, dengan misi – misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada RPJMD Tahun 2025-2029 maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan mendukung pelaksanaan, yaitu :

Misi 1 Pembangunan Manusia yang Unggul , Berbudaya dan Berakhlak Mulia

Tujuan : Menguatnya fondasi transformasi sosial

Misi 3 Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Merata dan Syariah

Tujuan : Terwujudnya perekonomian daerah yang merata

Pada urusan Transmigrasi Pengembangan Desa dan Transmigrasi untuk Mendorong pembangunan desa unggul

3.1 Tujuan

Tujuan Renstra ini adalah untuk memberikan arah strategis organisasi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, organisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola, mengoptimalkan sumber daya, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh pemangku kepentingan. Tujuan ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan,

program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra. Adapun Tujuan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Kalimantan Selatan, Yaitu : ***“Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran serta Terwujudnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi ”***

3.2 Sasaran

Sasaran Renstra dirumuskan untuk mengukur pencapaian tujuan secara lebih terperinci dan terukur. Sasaran ditetapkan, yaitu :

1. Meningkatnya kesempatan Kerja dan perlindungan tenaga kerja
2. Meningkatnya Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi; dan
3. Meningkatnya Kualitas Tata kelola pemerintahan perangkat daerah

Dengan tujuan dan sasaran ini, seluruh program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilaksanakan secara fokus, terarah, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Penentuan Tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah.

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- Menurunnya Pengangguran - Menurunnya Kemiskinan - Meningkatkan perekonomian masyarakat desa	Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran serta Terwujudnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi		Persentase Penduduk Miskin	3,85 %	3,46 %	3,41%	3,11 %	2,64 %	2,39%	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,15%	4,1%	4,05 %	4%	3,95 %	3,9 %	
			Persentase Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di 45 kawasan transmigrasi	1,1 %	1,35%	1,6%	1,85%	2,1%	2,35%	
		Meningkatnya kesempatan Kerja dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70.45%	70.68%	70.91%	71.14%	71.37%	71.60%	
			Persentase tenaga kerja yang terlindungi	12,31 %	12,37 %	12,43 %	12,49 %	12,55 %	12,68 %	
		2. Meningkatnya Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi	Persentase dukungan kegiatan kementerian/ lembaga/ Pemerintah daerah di Kawasan Transmigrasi	40 %	42,5 %	45 %	47,5 %	50 %	52,5 %	

		3. Meningkatnya Indeks Kepuasan terhadap layanan kesekretariatan dan publik	1. Nilai Sakip perangkat daerah	90.01	90.02	90.03	90.04	90.05	90.06	
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah	95	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5	
			3. Jumlah Inovasi yang diterapkan	1	1	1	1	1	1	
			4. Indeks maturitas SPIP perangkat daerah	3.00	3.09	3.18	3.30	3.45	3.60	
			5. Indeks Pelayanan Publik	4,0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

Dalam bab ini memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi yang dipilih. Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan dan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD.

Adapun Renstra ini disusun selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menitik beratkan pada :

1. Peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja lokal.
2. Peningkatan perlindungan hubungan industrial.
3. Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja
4. Pengembangan warga di kawasan transmigrasi.

Selanjutnya untuk Pembangunan Prioritas tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, maka pada Renstra ini ada Penahapan yang disajikan pada tabel 3.4 dibawah .

Tabel 3.4 Penahapan Renstra

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fokus pada Penguatan Kualitas SDM, dengan melakukan Pelatihan berbasis kompetensi dan akreditasi Lembaga pelatihan swasta	Pemetaan kebutuhan tenaga kerja per sektor dan wilayah, peningkatan pelatihan vokasi, Fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dan lembaga pelatihan kerja (LPK/BLK)	Integrasi sistem informasi tenaga kerja dan investasi logistik, pelayanan digital ketenagakerjaan, serta Inovasi tenaga kerja kepusat – pusat industri dan pelatihan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja lokal, fasilitasi hubungan industrial yang kondusif dan berkelanjutan antara investor dan pekerja	Penerapan sistem informasi logistik daerah yang terhubung dengan sistem ketenagakerjaan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sektor logistik, Penguatan kerja sama antara Disnakertrans, pelaku industri logistik dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan link and match kompetensi SDM

Tabel sesuai Inmen No. 2

3.4 Arah Kebijakan

Dalam Subbab ini memuat Arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan arah kebijakan strategis yang adaptif, terintegrasi, dan inklusif. Arah kebijakan ini difokuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2025 – 2029, yaitu “ *Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera)*” sebagai gerbang logistik Kalimantan , arah kebijakan bidang tenaga kerja dan transmigrasi difokuskan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan mewujudkan kawasan transmigrasi.

Penentuan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan sasaran disajikan pada tabel 3.5 di bawah ini.

Tabel 3.5 Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Peningkatan pelaksanaan pelatihan reskilling dan upskilling dan transisi school - to – work	Peningkatan Kompetensi dan Daya saing Tenaga Kerja dengan mendorong program reskilling dan upskilling untuk menghadapi perubahan teknologi dan tuntutan dunia usaha	
2		Peningkatan penempatan tenaga kerja	Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga kerja	
3			Penguatan Sistem Informasi Pasar kerja dan Antar Kerja	
4		Penerapan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Hubungan Industrial dan Peningkatan Perlindungan melalui pengawasan Ketenagakerjaan	
5		Pengembangan desa dan transmigrasi	Pengembangan Kawasan transmigrasi Prioritas	

Tabel sesuai Inmen No. 2

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA
BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

4.1 Program, Kegiatan, sub Kegiatan dan Kinerja SKPD

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka diperlukan program yang bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, serta untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah. Pada Bab ini memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, pendanaan serta Kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Penentuan program, kegiatan, subkegiatan, pendanaan serta Kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4, tabel 4.5, tabel 4.6 dibawah ini :

KETERKAITAN SASARAN RPJMD DENGAN RENSTRA PD

TABEL 4.2 TEKNIS MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PD

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Menurunnya Kemiskinan - Menurunnya Pengangguran - Meningkatnya Taraf Kehidupan dan Perekonomian Masyarakat Desa				Menurunnya kemiskinan dan pengangguran serta Terwujudnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi	1. Persentase Penduduk Miskin		
					2. Tingkat pengangguran terbuka		
					3. Persentase peningkatan pendapatan perKapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi		
		Meningkatnya kesempatan Kerja dan perlindungan tenaga kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		
					Persentase tenaga kerja yang terlindungi		
- Menurunnya Kemiskinan - Menurunnya Pengangguran				Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Meningkatnya kualitas Data Rencana Tenaga kerja yang disusun	Jumlah jenis data rencana tenaga kerja yang disusun	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
- Menurunnya Kemiskinan - Menurunnya Pengangguran				Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi dan produktivitas yang bekerja atau berwirausaha sesuai kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
					Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
				Meningkatnya lulusan latihan kerja yang bersertifikat	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	
				Meningkatnya LPK yang terakreditasi	Persentase LPK yang terakreditasi	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	
				Meningkatnya Dokumen Konsultasi Produktivitas	Jumlah Dokumen konsultasi peningkatan produktivitas	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	
					Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	
				Meningkatnya Tingkat Produktivitas Perusahaan	Jumlah perusahaan yang diukur tingkat produktivitasnya	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
Menurunnya pengangguran				Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Meningkatnya Tenaga Kerja yang diberdayakan	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Pelayanan Antar Kerja	
					Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	
					Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
				Meningkatnya wirausaha baru	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	
				Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	
				Meningkatnya pelayanan bagi PMI Pra Penempatan	Persentase PMI Pra Penempatan yang terlayani	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
					Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
				Meningkatnya pelayanan bagi PMI Purna Penempatan	Persentase PMI Purna Penempatan yang terlayani	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
- Menurunnya Kemiskinan - Menurunnya Pengangguran				Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja	<p>1. Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog Sosial dengan perusahaan;</p> <p>2. Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan</p> <p>3. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS</p>	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Ketenagakerjaan		
				Meningkatnya kelembagaan hubungan industrial dan jamsostek	1.Persentase Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP); 2. Persentase perusahaan yang memiliki PKB	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	
					Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB,Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
				Meningkatnya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama	1. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 2. Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	1. Persentase Kenaikan UMP dan UMK 2. Persentase Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
					Jumlah Penetapan UMP	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah penetapan UMK	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
Menurunnya pengangguran			Meningkatnya kualitas pengawasan ketenagakerjaan		1.Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
					2.Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan		
				Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kerja	Persentase perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kerja	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	
				Meningkatnya penyelesaian kasus melalui penegakan hukum ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus yang dapat diselesaikan melalui penegakan hukum ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
					Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	
				Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Persentase perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	
		2. Meningkatkan Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi			Persentase dukungan kegiatan kementrian / lembaga / Pemerintah / daerah / masyarakat / Badan usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi		
			Terwujudnya kawasan Transmigrasi yang berkembang		Jumlah Kabupaten yang diidentifikasi potensi kawasan transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Meningkatnya desa yang diidentifikasi menjadi kawasan transmigrasi	Jumlah desa yang diidentifikasi yang berpotensi menjadi kawasan transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	
Meningkatnya taraf kehidupan dan perekonomian			Meningkatnya Sumber Daya di kawasan transmigrasi		Persentase Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
masyarakat desa							
				Meningkatnya pembinaan di kawasan transmigrasi	Jumlah desa di kawasan transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap pemantapan	
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	
				Meningkatnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi	Jumlah desa di kawasan transmigrasi yang difasilitasi Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan kelembagaan	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap pemantapan	
					Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	
		3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan kinerja perangkat daerah			1. Nilai Sakip perangkat daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah 3. Jumlah Inovasi yang diterapkan 4. Nilai maturitas SPIP perangkat daerah 5. Indeks Pelayanan Publik		
			1. Meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD		1.1. Persentase kegiatan tepat waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				1.2. Persentase laporan / telaahan staf tepat waktu			
				1.3. Nilai Kepatuhan pengelolaan administrasi internal			
				1.4. Persentase aduan / keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti			
				1.5. Persepsi internal antar bidang / unit terhadap layanan sekretariat			
				1.6 IKM Layanan BLUD			
				1.7 IKM Layanan UPT			

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					1.8. Nilai Pendapatan Daerah BLUD		
					1.9. Nilai Pendapatan UPT		
				Menyusun perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Disnakertrans Prov. Kalsel	Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Menyusun administrasi keuangan Disnakertrans Prov. Kalsel	Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM		Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya perusahaan yang dilayani		Persentase peningkatan pelayanan dan penunjang BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (RUTIN+NAKER)				63.143.600.608	-	63.377.653.557	-	64.604.220.527	-	65.303.025.017	-	66.067.969.494	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				10.116.803.815	-	10.154.303.542	-	10.350.822.861	-	10.462.784.610	-	10.585.343.240	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				100.012.400		100.383.114		102.325.859		103.432.687		104.644.273	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100%	100%	100.012.400	100%	100.383.114	100%	102.325.859	100%	103.432.687	100%	104.644.273	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				100.012.400		100.383.114		102.325.859		103.432.687		104.644.273	
Meningkatnya kualitas Data Rencana Tenaga kerja yang di susun	Jumlah jenis data rencana tenaga kerja yang disusun	4 data	3 data	100.012.400	3 data	100.383.114	3 data	102.325.859	3 data	103.432.687	3 data	104.644.273	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 dokumen	1 Dokumen	100.012.400	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	56.942.745	1 Dokumen	58.049.573	1 Dokumen	59.261.159	Disnakertrans

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	n/a	n/a		39 Orang	22.383.114	39 Orang	22.383.114	39 Orang	22.383.114	39 Orang	22.383.114	Disnaker trans
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	n/a	n/a		13 Orang	23.000.000	13 Orang	23.000.000	13 Orang	23.000.000	13 Orang	23.000.000	Disnaker trans
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				4.210.327.860		4.225.934.187		4.307.719.974		4.354.315.290		4.405.320.728	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi dan produktivitas yang bekerja atau berwirausaha sesuai kompetensi	56%	60%	4.210.327.860	62%	4.225.934.187	64%	4.307.719.974	66%	4.354.315.290	68%	4.405.320.728	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	5.88%	5.96%		6.00%		6.03%		6.07%		6.11%		
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	601.06	683.82		724'57		765.33		806.08		846.83		

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi				4.012.327.860		3.952.934.187		4.034.719.974		4.081.315.290		4.132.320.728	
Meningkatnya lulusan latihan kerja yang bersertifikat	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	61.32%	60%	4.012.327.860	60%	3.952.934.187	60%	4.034.719.974	60%	4.081.315.290	60%	4.132.320.728	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	404 org	502 org	3.392.371.860	576 org	3.392.371.860	650 org	3.474.157.647	724 org	3.520.752.963	798	3.571.758.401	Nakertrans, BLK
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2 lembaga	2 Lembaga	26.560.000	2 Lembaga	26.560.000	3 Lembaga	26.560.000	4 Lembaga	26.560.000	5 Lembaga	26.560.000	BLK
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	59 unit	373 Unit	593.396.000	95 Unit	534.002.327	12 Unit	534.002.327	84 Unit	534.002.327	91 Unit	534.002.327	BLK
Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				103.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000		103.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)			
Meningkatnya LPK yang terakreditasi	Persentase LPK yang terakreditasi	100%	50%	103.000.000	50%	103.000.000	50%	103.000.000	50%	103.000.000	50%	103.000.000		
Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	12 LPK	103.000.000	12 LPK	103.000.000	13 LPK	103.000.000	13 LPK	103.000.000	13 LPK	103.000.000	Disnakertrans, BLK	
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					-		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	
Meningkatnya Dokumen Konsultasi Produktivitas	Jumlah Dokumen konsultasi peningkatan produktivitas	n/a	n/a	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	n/a	n/a	-	1 Perusahaan	75.000.000	1 Perusahaan	75.000.000	1 Perusahaan	75.000.000	1 Perusahaan	75.000.000	75.000.000	Disnakertrans
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000		95.000.000	
Meningkatnya Tingkat Produktivitas Perusahaan	Jumlah perusahaan yang diukur tingkat produktivitasnya	85%	3 Perusahaan	95.000.000	4 Perusahaan	95.000.000	5 Perusahaan	95.000.000	6 Perusahaan	95.000.000	7 Perusahaan	95.000.000	95.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	2 dokumen	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	95.000.000	Disnakertrans
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.775.618.680		1.782.200.325		1.816.691.789		1.836.342.400		1.857.852.889	
Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	47.11%	43.58%	1.775.618.680	43.89%	1.782.200.325	44.33%	1.816.691.789	44.67%	1.836.342.400	45.09%	1.857.852.889	
Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				367.309.480		505.858.825		540.350.289		560.000.900		581.511.389	
Meningkatnya Tenaga Kerja yang diberdayakan	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan	n/a	-	367.309.480	8512 orang	138.549.345	8612 orang	138.549.345	8712 orang	138.549.345	8812 orang	138.549.345	
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	n/a	n/a	-	10 Orang	38.400.000	10 Orang	38.400.000	30 Orang	38.400.000	30 Orang	38.400.000	Disnakertrans

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	n/a	n/a	-	8357 Orang	25.149.345	8457 Orang	25.149.345	8557 Orang	25.149.345	8657 Orang	25.149.345	Disnakertrans
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	n/a	n/a	-	100 Orang	35.000.000	100 Orang	35.000.000	100 Orang	35.000.000	100 Orang	35.000.000	Disnakertrans
Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	n/a	n/a	-	40 Orang	35.000.000	40 Orang	35.000.000	40 Orang	35.000.000	40 Orang	35.000.000	Disnakertrans
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	n/a	n/a	-	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	5.000.000	Disnakertrans
Meningkatnya wirausaha baru	Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru		50%	367.309.480	55,55%	367.309.480	60%	401.800.944	63.63%	421.451.555	66.66%	442.962.044	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM /OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN/O UTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	136 org	128	367.309.480	144	367.309.480	160	401.800.944	176	421.451.555	192	442.962.044	Disnaker trans
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				868.639.000		868.639.000		868.639.000		868.639.000		868.639.000	
Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja	95.80%	95,89	868.639.000	95,98	868.639.000	96,07	868.639.000	96,15	868.639.000	96,22	868.639.000	
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	150 data	150 data	42.929.000	170 data	42.929.000	180 data	42.929.000	200 data	42.929.000	225 data	42.929.000	BLK
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	6495 orang	5350 orang	490.660.500	5400 orang	490.660.500	5450 orang	490.660.500	5500 orang	490.660.500	5550 orang	490.660.500	Disnaker trans
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	656 orang	200 orang	335.049.500	300 orang	335.049.500	400 orang	335.049.500	450 orang	335.049.500	500 orang	335.049.500	Disnaker trans

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)			
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)			539.670.200		407.702.500		407.702.500		407.702.500		407.702.500		
	Meningkatnya pelayanan bagi PMI Pra Penempatan	Persentase PMI Pra Penempatan yang terlayani	100%	100%	381.976.700	100%	250.009.000	100%	250.009.000	100%	250.009.000	100%	250.009.000	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	n/a	10 Orang	250.009.000	120 Orang	250.009.000	135 Orang	250.009.000	150 Orang	250.009.000	165 Orang	250.009.000	Disnakertrans
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA	202 orang	100 orang	131.967.700	n/a	0	n/a	0	n/a	0	n/a	0	Disnakertrans
	Meningkatnya pelayanan bagi PMI Purna Penempatan	Persentase PMI Purna Penempatan yang terlayani		100%	157.693.500	100%	157.693.500	100%	157.693.500	100%	157.693.500	100%	157.693.500	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	n/a	80 Orang	157.693.500	96 Orang	157.693.500	112 Orang	157.693.500	128 Orang	157.693.500	144 Orang	157.693.500	Disnakertrans

BIDANG URUSAN/PRO GRAM /OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN/O UTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				1.172.813.675		1.177.160.917		1.199.942.869		1.212.922.292		1.227.130.182	
Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja	1. Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog Sosial dengan perusahaan;	66.52%	68.42 % ;	1.172.813.675	69.28 %;	1.177.160.917	70.14 %;	1.199.942.869	71.06 % ;	1.212.922.292	72.08%;	1.227.130.182	
	2. Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan	18.76%	28.76%		33.76%		38.76%		43.76%		48.76%		
	3. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	58.58%	59,11%		59,37%		59,77%		60.30%		60.96%		

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			249.999.650		249.999.650		249.999.650		249.999.650		249.999.650	
Meningkatnya kelembagaan hubungan industrial dan jamsostek	1.Persentase Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP);	7,28 %;	8,88%;	249.999.650	9,68%;	249.999.650	10,48%	249.999.650	11,28%;	249.999.650	12,06%	249.999.650	
	2. Persentase perusahaan yang memiliki PKB	2.3%	2.60%		2.72%		2.85%		2.98%		3.11%		
Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	30 perusahaan	32 perusahaan	156.586.200	34 perusahaan	156.586.200	36 perusahaan	156.586.200	36 perusahaan	156.586.200	40 perusahaan	156.586.200	Disnakertrans
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	10 perusahaan	10 perusahaan	67.446.450	11 perusahaan	67.446.450	12 perusahaan	67.446.450	13 perusahaan	67.446.450	14 perusahaan	67.446.450	Disnakertrans

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek	1 laporan	1 laporan	25.967.000	1 laporan	25.967.000	1 laporan	25.967.000	1 laporan	25.967.000	1 laporan	25.967.000	Disnakertrans
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				299.999.800		304.347.042		304.347.042		304.347.042		304.347.042	
Meningkatnya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	59% (TW III) 32,83% (TW IV) 22 PB dari 67 kasus)	64%	299.999.800	69%	304.347.042	74%	304.347.042	79%;	304.347.042	84%;	304.347.042	
	2. Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	2.22%	2.03%		2.27%		2.29%		2.31%		2.33%		

BIDANG URUSAN/PRO GRAM /OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN/O UTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	40 perkara	45 Perkara	37.445.200	50 Perkara	41.792.442	55 Perkara	41.792.442	60 Perkara	41.792.442	65 Perkara	41.792.442	Disnakertrans
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	30 perkara	35 perkara	38.121.500	40 perkara	38.121.500	45 perkara	38.121.500	50 perkara	38.121.500	55 perkara	38.121.500	Disnakertrans
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	109 SP	110 Asosiasi dan Serikat Pekerja	119.120.500	111 Asosiasi dan Serikat Pekerja	119.120.500	112 Asosiasi dan Serikat Pekerja	119.120.500	114 Asosiasi dan Serikat Pekerja	119.120.500	115 Asosiasi dan Serikat Pekerja	119.120.500	Disnakertrans
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	3 Lembaga	105.312.600	3 Lembaga	105.312.600	3 Lembaga	105.312.600	3 Lembaga	105.312.600	3 Lembaga	105.312.600	Disnakertrans

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)			622.814.225		622.814.225		645.596.177		658.575.600		672.783.490	
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	1. Persentase Kenaikan UMP dan UMK	6.5%	6.52%	622.814.225	6,53%;	622.814.225	6.54%;	645.596.177	6.55%	658.575.600	6.56%	672.783.490	
	2. Persentase Perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	56.19%	60.10%		62.10%		64.10%		66.10%		68.10%		
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	248.275.200	1 Surat Keputusan	248.275.200	1 Surat Keputusan	271.057.152	1 Surat Keputusan	284.036.575	1 Surat Keputusan	298.244.465	Disnakertrans
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	99.088.725	1 Surat Keputusan	99.088.725	1 Surat Keputusan	99.088.725	1 Surat Keputusan	99.088.725	1 Surat Keputusan	99.088.725	Disnakertrans
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2000 orang	2100 Orang	275.450.300	2200 Orang	275.450.300	2300 Orang	275.450.300	2400 Orang	275.450.300	2500 Orang	275.450.300	Disnakertrans

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				2.858.031.200		2.868.624.999		2.924.142.370		2.955.771.941		2.990.395.168	
Meningkatnya kualitas pengawasan ketenagakerjaan	1.Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya	89,76%	92%	2.858.031.200	93%	2.868.624.999	94%	2.924.142.370	95%	2.955.771.941	96%	2.990.395.168	
	2.Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan	58,58%	59,11%		59,37%		59,77%		60,30%		60,96%		
Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				2.858.031.200		2.868.624.999		2.924.142.370		2.955.771.941		2.990.395.168	
Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kerja	Persentase perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kerja	1,4%	46,03%	760.042.400	48,41%	765.042.400	50,79%	790.042.400	53,17%	821.671.971	55,54%	856.295.198	
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	754	808	760.042.400	862	765.042.400	916	790.042.400	970	821.671.971	1024	856.295.198	Disnaker trans, Lab K3, Wasnaker I,II,III,IV

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Meningkatnya penyelesaian kasus melalui penegakan hukum ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian kasus yang dapat diselesaikan melalui penegakan hukum ketenagakerjaan		70.10%	291.333.800	71.92%	296.927.599	74.32%	327.444.970	76.57%	327.444.970	78.90%	327.444.970	
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	33	45	291.333.800	49	296.927.599	54	327.444.970	54	327.444.970	53	327.444.970	Disnakertrans, Lab K3, Wasnaker I,II,III,IV
Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Persentase perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)		46,03%	1.806.655.000	48,41%	1.806.655.000	50,79%	1.806.655.000	53,17%	1.806.655.000	55,54%	1.806.655.000	
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	200	210	1.806.655.000	220	1.806.655.000	230	1.806.655.000	240	1.806.655.000	250	1.806.655.000	Lab K3, Wasnaker I,II,III,IV
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				372.766.000	-	374.147.723	-	381.388.717	-	385.514.086	-	390.029.908	
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				137.266.000		137.774.801		140.441.198		141.960.309		143.623.199	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Terwujudnya kawasan Transmigrasi yang berkembang	Jumlah Kabupaten yang diidentifikasi potensi kawasan transmigrasi	n/a	4 kabupaten	137.266.000	4 kabupaten	137.774.801	4 kabupaten	140.441.198	4 kabupaten	141.960.309	4 kabupaten	143.623.199	
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				137.266.000		137.774.801		140.441.198		141.960.309		143.623.199	
Meningkatnya desa yang diidentifikasi menjadi kawasan transmigrasi	Jumlah desa yang diidentifikasi yang berpotensi menjadi kawasan transmigrasi	350 hektar utk HPL	12 desa	137.266.000	12 desa	137.774.801	12 desa	140.441.198	12 desa	141.960.309	12 desa	143.623.199	
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	137.266.000	1 Dokumen	137.774.801	1 Dokumen	140.441.198	1 Dokumen	141.960.309	1 Dokumen	143.623.199	Disnakertrans
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				235.500.000		236.372.922		240.947.519		243.553.777		246.406.709	
Meningkatnya Sumber Daya di kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	100%	100%	235.500.000	100%	236.372.922	100%	240.947.519	100%	243.553.777	100%	246.406.709	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap pematapan			235.500.000		236.372.922		240.947.519		243.553.777		246.406.709	
Meningkatnya pembinaan di kawasan transmigrasi	Jumlah desa di kawasan transmigrasi yang difasilitasi Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan kelembagaan	3 Satuan Permukiman	3 desa di kawasan transmigrasi	135.500.000	3 desa di kawasan transmigrasi	136.372.922	3 desa di kawasan transmigrasi	140.947.519	3 desa di kawasan transmigrasi	143.553.777	3 desa di kawasan transmigrasi	146.406.709	
Penguatan SDM dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 KK	120 KK	135.500.000	120 KK	136.372.922	120 KK	140.947.519	120 KK	143.553.777	120 KK	146.406.709	Disnakertrans
Meningkatnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Kawasan Transmigrasi	Jumlah desa di kawasan transmigrasi yang difasilitasi Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan kelembagaan	2 Satuan Permukiman	4 desa di kawasan transmigrasi	100.000.000	4 desa di kawasan transmigrasi	100.000.000	4 desa di kawasan transmigrasi	100.000.000	4 desa di kawasan transmigrasi	100.000.000	4 desa di kawasan transmigrasi	100.000.000	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pematapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman	3 Satuan Permukiman	100.000.000	3 Satuan Permukiman	100.000.000	3 Satuan Permukiman	100.000.000	3 Satuan Permukiman	100.000.000	3 Satuan Permukiman	100.000.000	Disnakertrans

BIDANG URUSAN/PRO GRAM /OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN/O UTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				53.026.796.793		53.223.350.015		54.253.397. 666		54.840.240.40 7		55.482.626.254	
1. Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	1.1. Persentase kegiatan tepat waktu	100%	100%	50.401.796.793	100%	50.598.350.015	100%	51.528.397. 666	100%	51.840.240.40 7	100%	52.315.193.754	
	1.2. Persentase laporan / telaahan staf tepat waktu	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	1.3. Nilai Kepatuhan pengelolaan administrasi internal	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	1.4. Persentase aduan / keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	1.5. Persepsi internal antar bidang / unit terhadap layanan sekretariat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	1.6 IKM Layanan BLUD	100	85		85		86		86		87		

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
	1.7 IKM Layanan UPT	88.4	90		92		95		95		96		
	1.8. Nilai Pendapatan Daerah BLUD	2.500.000.000	2.625.000.000	2.625.000.000	2.750.000.000	2.750.000.000	2.875.000.000	2.875.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.125.000.000	3.167.432.500	
	1.9. Nilai Pendapatan UPT	105.766.000	53.160.000		59.686.000		65.957.000		72.219.400		79.441.340		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah				743.211.825		743.211.825		743.211.825		743.211.825		743.211.825	
Menyusun perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Disnakertrans Prov. Kalsel	Nilai komponen perencanaan pada LKIP Disnakertrans prov kalsel	25.70 skor	26.10 skor	743.211.825	26.30 skor	743.211.825	26.50 skor	743.211.825	26.70 skor	743.211.825	26.90 skor	743.211.825	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	601.274.900	4 Dokumen	601.274.900	4 Dokumen	601.274.900	4 Dokumen	601.274.900	4 Dokumen	601.274.900	Nakertrans, BLK, Lab K3, Wasnaker I,II,III,IV
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.427.400	1 Dokumen	13.427.400	1 Dokumen	13.427.400	1 Dokumen	13.427.400	1 Dokumen	13.427.400	Nakertrans, Wasnaker I,III

BIDANG URUSAN/PRO GRAM /OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN/O UTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.030.800	1 Dokumen	7.030.800	1 Dokumen	7.030.800	1 Dokume n	7.030.800	1 Dokumen	7.030.800	Nakertar ns, Wasnake r II,IV
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	1 dokumen	2.272.000	1 dokumen	2.272.000	1 dokumen	2.272.000	1 dokume n	2.272.000	1 dokumen	2.272.000	Nakertar ns, Wasnake r IV
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	n/a	1 dokumen	1.611.400	1 dokumen	1.611.400	1 dokumen	1.611.400	1 dokume n	1.611.400	1 dokumen	1.611.400	Nakertar ns, Wasnake r IV
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	24.322.000	15 Laporan	24.322.000	15 Laporan	24.322.000	15 Laporan	24.322.000	15 Laporan	24.322.000	BLK, Wasnake r II
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	n/a	1 Data	51.563.425	1 Data	51.563.425	1 Data	51.563.425	1 Data	51.563.425	1 Data	51.563.425	BLK

BIDANG URUSAN/PRO GRAM /OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN/O UTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	n/a	1 Dokumen	41.709.900	1 Dokumen	41.709.900	1 Dokumen	41.709.900	1 Dokumen	41.709.900	1 Dokumen	41.709.900	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				37.029.661.342		37.142.174.564		37.562.262.215		37.874.104.956		38.124.104.956	
Menyusun administrasi keuangan Disnakertrans Prov. Kalsel	Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans Prov Kalsel	100%	100%	37.029.661.342	100%	37.142.174.564	100%	1.805.324.600	100%	37.874.104.956	100%	38.124.104.956	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 orang / 14 bulan	210 orang / 14 bulan	35.224.336.742	220 orang / 14 bulan	35.336.849.964	220 orang / 14 bulan	35.756.937.615	220 orang / 14 bulan	36.068.780.356	220 orang / 14 bulan	36.318.780.356	Disnakertrans
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	982.919.000	12 Dokumen	982.919.000	12 Dokumen	982.919.000	12 Dokumen	982.919.000	12 Dokumen	982.919.000	Nakertrans, BLK, Lab K3, Wasnaker I,II,III,IV
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	393.745.900	60 Dokumen	393.745.900	60 Dokumen	393.745.900	60 Dokumen	393.745.900	60 Dokumen	393.745.900	Nakertrans, Wasnaker II

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET		
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3 laporan	42.176.500	3 laporan	42.176.500	3 laporan	42.176.500	3 laporan	42.176.500	3 laporan	42.176.500	3 laporan	42.176.500	Nakertrans, BLK, Wasnaker I,II,III,IV
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	386.483.200	18 laporan	386.483.200	18 laporan	386.483.200	18 laporan	386.483.200	18 laporan	386.483.200	18 laporan	386.483.200	Nakertrans, BLK, Lab K3, Wasnaker I,II,III,IV
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				109.365.900		109.365.900		109.365.900		109.365.900		109.365.900		109.365.900	
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sarana dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	100%	100%	109.365.900	100%	109.365.900	100%	109.365.900	100%	109.365.900	100%	109.365.900	100%	109.365.900	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM /OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN/O UTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2 Dokumen	8.243.900	2 Dokumen	8.243.900	2 Dokumen	8.243.900	2 Dokumen	8.243.900	2 Dokumen	8.243.900	BLK, Wasnaker II
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	12 Laporan	47.584.000	12 Laporan	47.584.000	12 Laporan	47.584.000	12 Laporan	47.584.000	12 Laporan	47.584.000	BLK
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	24 Laporan	53.538.000	24 Laporan	53.538.000	24 Laporan	53.538.000	24 Laporan	53.538.000	24 Laporan	53.538.000	BLK, Wasnaker II
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				797.850.000		767.890.000		797.850.000		797.850.000		797.850.000	
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sarana dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	100%	100%	797.850.000	100%	767.890.000	100%	797.850.000	100%	797.850.000	100%	797.850.000	

BIDANG URUSAN/PRO GRAM /OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN/O UTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	61 paket	79 paket	44.960.000	5 paket	15.000.000	80 paket	44.960.000	85 paket	44.960.000	78 paket	44.960.000	BLK, Wasnaker II,III,IV
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Dokumen	142.846.000	1 Dokumen	142.846.000	1 Dokumen	142.846.000	1 Dokumen	142.846.000	1 Dokumen	142.846.000	Nakeratrans
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 dokumen	9.722.000	12 Dokumen	9.722.000	12 Dokumen	9.722.000	12 Dokumen	9.722.000	12 Dokumen	9.722.000	BLK, Wasnaker II
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Org	56 Orang	335.646.000	56 Orang	335.646.000	60 Orang	335.646.000	60 Orang	335.646.000	64 Orang	335.646.000	BLK, LAB K3
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	77 orang	204 Org	264.676.000	206 org	264.676.000	215 Orang	264.676.000	212 Orang	264.676.000	216 org	264.676.000	Nakeratrans, BLK, Lab K3, Wasnaker II,III,IV

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)			
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.944.364.800		1.959.364.800			1.959.364.800		1.959.364.800		1.959.364.800	
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana , menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	100%	100%	4.620.052.800	100%	1.959.364.800	100%	1.959.364.800	100%	1.959.364.800	100%	1.959.364.800		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	139.876.900	12 Paket	139.876.900	12 Paket	139.876.900	12 Paket	139.876.900	12 Paket	139.876.900	Nakeratrans, BLK, LAB K3, Wasnaker I,II,IV	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	173.836.400	12 Paket	173.836.400	12 Paket	173.836.400	12 Paket	173.836.400	12 Paket	173.836.400	Nakeratrans, BLK, LAB K3, Wasnaker I,II,IV	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	15.000.000	BLK	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	41.408.800	12 Paket	41.408.800	12 Paket	41.408.800	12 Paket	41.408.800	12 Paket	41.408.800	BLK, LAB K3	

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	98.312.200	12 Paket	98.312.200	12 Paket	98.312.200	12 Paket	98.312.200	12 Paket	98.312.200	Nakeratrans, BLK, LAB K3, Wasnaker I,II,III,IV
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	31.200.000	12 Dokumen	31.200.000	12 Dokumen	31.200.000	12 Dokumen	31.200.000	12 Dokumen	31.200.000	Nakeratrans, BLK, LAB K3, Wasnaker I,II,III,IV
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.369.032.000	12 Laporan	1.369.032.000	12 Laporan	1.369.032.000	12 Laporan	1.369.032.000	12 Laporan	1.369.032.000	Nakeratrans, BLK, LAB K3, Wasnaker I,II,III,IV
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	90.698.500	1 Dokumen	90.698.500	1 Dokumen	90.698.500	1 Dokumen	90.698.500	1 Dokumen	90.698.500	Nakeratrans
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.675.688.000	2.774.688.000		3.074.688.000		3.074.688.000		3.074.688.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	100%	100%	2.675.688.000	100%	2.774.688.000	100%	3.074.688.000	100%	3.074.688.000	100%	3.074.688.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	1 unit	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Nakertrans, BLK, Wasnaker II,IV
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	13 unit	1.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	Nakertrans, BLK, Wasnaker I,II,III,IV
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	732 paket	295	336.656.000	405	336.656.000	441	336.656.000	752	336.656.000	695	336.656.000	Nakertrans, BLK, Lab K3, Wasnaker I,II,III,IV
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	165	261	2.104.520.000	390	2.104.520.000	334	2.104.520.000	377	2.104.520.000	558	2.104.520.000	Nakertrans, BLK, LAB K3, Wasnaker II,III,IV

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	3 unit	233.512.000	3 unit	233.512.000	3 unit	233.512.000	3 unit	233.512.000	3 unit	233.512.000	BLK, Wasnaker IV
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.314.897.826		4.314.897.826		4.464.897.826		4.464.897.826		4.689.851.173	
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sarana dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	100%	100%	4.314.897.826	100%	4.314.897.826	100%	4.464.897.826	100%	4.464.897.826	100%	4.689.851.173	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	79.774.000	12 Laporan	79.774.000	12 Laporan	79.774.000	12 Laporan	79.774.000	12 Laporan	79.774.000	Nakertans, BLK, Lab K3, Wasnaker I,II, III,IV
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	927.367.326	12 Laporan	927.367.326	12 Laporan	927.367.326	12 Laporan	927.367.326	12 Laporan	1.027.367.326	Nakertans, BLK, LAB K3, Wasnaker II,III,IV

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	14.116.000	12 Paket	14.116.000	12 Paket	14.116.000	12 Paket	14.116.000	12 Paket	14.116.000	Wasnaker II
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.293.640.500	12 Laporan	3.293.640.500	12 Laporan	3.443.640.500	12 Laporan	3.443.640.500	12 Laporan	3.568.593.847	Nakertrans, BLK, Lab K3, Wasnaker I,II, III,IV
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.786.757.100		2.786.757.100		2.816.757.100		2.816.757.100		2.816.757.100	
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Persentase pemenuhan terkait sapras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel	100%	100%	2.786.757.100	100%	2.786.757.100	100%	2.816.757.100	100%	2.816.757.100	100%	2.816.757.100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	77.124.000	1 unit	77.124.000	1 unit	107.124.000	1 unit	107.124.000	1 unit	107.124.000	BLK

BIDANG URUSAN/PROGRAM /OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 unit	48	1.052.483.100	56	1.052.483.100	62	1.052.483.100	66	1.052.483.100	76	1.052.483.100	Nakertrans, BLK, Lab K3, Wasnaker I,II, III,IV
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	38 unit	8.500.000	42 unit	8.500.000	42 unit	8.500.000	46 unit	8.500.000	50 unit	8.500.000	BLK, Wasnaker IV
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	368 Unit	405	444.920.000	422	444.920.000	449	444.920.000	477	444.920.000	506	444.920.000	Nakertrans, BLK, Lab K3, Wasnaker I,II, III,IV
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	15 unit	1.113.120.000	13 unit	1.113.120.000	17 unit	1.113.120.000	13 UNIT	1.113.120.000	15 unit	1.113.120.000	Nakertrans, BLK, Lab K3, Wasnaker I,IV
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	5 unit	15.610.000	4 unit	15.610.000	5 unit	15.610.000	5 unit	15.610.000	5 unit	15.610.000	BLK, LAB K3, Wasnaker II

BIDANG URUSAN/PRO GRAM /OUTCOME/K EGIATAN/SUB KEGIATAN/O UTPUT	INDIKATOR / OUTCOME /OUTPUT	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5 Unit	75.000.000	4 Unit	75.000.000	5 Unit	75.000.000	4 Unit	75.000.000	5 Unit	75.000.000	BLK, LAB K3, Wasnaker III
Peningkatan Pelayanan BLUD				2.625.000.000		2.625.000.000		2.725.000.000		3.000.000.000		3.167.432.500	
Meningkatnya perusahaan yang dilayani	Persentase peningkatan pelayanan dan penunjang BLUD	100%	100%	2.625.000.000	100%	2.625.000.000	100%	2.725.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.167.432.500	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 BLUD	1 BLUD	2.625.000.000	1 BLUD	2.625.000.000	1 BLUD	2.725.000.000	2 BLUD	3.000.000.000	2 BLUD	3.167.432.500	BLK, LAB K3

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja			
				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	
				Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	
				Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	
				Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnyapenempatan tenaga kerja			
				Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	
				Pelayanan Antar Kerja	
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
				Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
				Perluasan Kesempatan Kerja	
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
				Job Fair/Bursa Kerja	
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)		
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
3	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja			
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
				Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
				Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		
				Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
				Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	
				Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Sumber Daya di kawasan transmigrasi			
				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap pemantapan	
				Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
			Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman		

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Penduduk Miskin	%	3,85	3,46	3,41	3,11	2,64	2,39
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,15	4,1	4,05	4	3,95	3,9
3	Persentase peningkatan pendapatan perKapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	%	1,1	1,35	1,6	1,85	2,1	2,35
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70.45	70,68	70,91	71,14	71,37	71,60
5	Persentase tenaga kerja yang terlindungi	%	12,31 %	12,37 %	12,43 %	12,49 %	12,55 %	12,68 %
6	Persentase dukungan kegiatan kementerian / lembaga / Pemerintah / daerah / masyarakat / Badan usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	%	40%	42,5 %	45%	47,5 %	50%	52,5 %
7	Nilai Sakip perangkat daerah	Angka	90,01	90.02	90.03	90.04	90.05	90.06
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah	Angka	95	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5
9	Jumlah Inovasi yang diterapkan	Angka	1	1	1	1	1	1
10	Nilai maturitas SPIP perangkat daerah	Angka	3.00	3.09	3.18	3.30	3.45	3.60
11	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	5,92	5,96	6,00	6,03	6,07	6,11
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah / Tenaga kerja	643,07	683,82	724,57	765.33	806,08	846,83
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	58,98	59,11	59,37	59,77	60,30	60,96
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	43,26	43,58	43,89	44.33	44,67	45.09
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan	%	58,98	59,11	59,37	59,77	60,30	60,96

BAB V

PENUTUP

Dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan dan transmigrasi yang semakin dinamis, Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Perumusan Perencanaan Strategis ini akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen melalui proses saling komunikasi, melalui proses komunikasi, baik secara top-down maupun secara bottom-up approach.

Sebagai konsekuensi dari adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan dapat memberikan arahan atau "guidance" serta sebagai tolok ukur dalam menilai kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan karena RENSTRA SKPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA - SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dapat dihadapi secara bersinergi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025–2029 ini bukanlah mutlak dan harus terus dievaluasi secara periodik di sesuaikan dengan perkembangan Provinsi Kalimantan Selatan dan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan selatan.

Mudah-mudahan apa yang diinginkan dapat berjalan sesuai rencana yang akhirnya dapat menciptakan tenaga kerja terampil, dan menempatkan pencari kerja sesuai dengan pendidikan dan dapat menciptakan usaha mandiri serta menciptakan hubungan yang hamonis dan perlindungan bagi tenaga kerja, profesional dan bermoral selaras serta dapat menciptakan masyarakat transmigrasi yang mandiri sesuai dengan rencana Provinsi Kalimantan Selatan untuk menciptakan "***KALSEL BEKERJA***" (***Kalimantan Selatan BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI DAN SEJAHTERA***) Menuju ***Gerbang Logistik Kalimantan***".

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI											
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya perekonomian masyarakat desa - Menurunnya kemiskinan - Menurunnya Pengangguran 	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran serta Terwujudnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,20	4,15	4,1	4,05	4	3,95	3,9	
			Persentase Penduduk Miskin (%)	4,02	3,85	3,46	3,41	3,11	2,64	2,39	
			Persentase peningkatan pendapatan perKapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi (%)	-	1,1	1,35	1,6	1,85	2,1	2,35	
		Meningkatnya kesempatan Kerja dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,22	70,45	70,68	70,91	71,14	71,37	71,60	
			persentase tenaga kerja terlindungi (%)	12,25	12,31	12,37	12,43	12,49	12,55	12,68	
		Meningkatnya Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi	Persentase dukungan kegiatan Kementerian / Lembaga / Pemerintah / Daerah / Masyarakat / Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi (%)	-	40	42,5	45	47,5	50	52,5	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	-	90,01	90,02	90,03	90,04	90,05	90,06	
			Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)	-	95	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
			Jumlah inovasi yang diterapkan (Angka)	1	1	1	1	1	1	1	
			Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Angka)	-	3,00	3,09	3,18	3,30	3,45	3,60	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	-	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					63.143.600.608,00		63.377.653.557,00		64.604.220.527,00		65.303.025.017,00		66.067.969.494,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					53.026.796.793,00		53.223.350.015,00		54.253.397.666,00		54.840.240.407,00		55.482.626.254,00	
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	-	100	100	53.026.796.793,00	100	53.223.350.015,00	100	54.253.397.666,00	100	54.840.240.407,00	100	55.482.626.254,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	-	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BLUD (Angka)	100	100	85		85		86		86		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD (Rp)	2.500.000.000	2.500.000.000	2.625.000.000		2.750.000.000		2.875.000.000		3.000.000.000		3.125.000.000		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	88,4	90	90		92		95		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	105.766.000	105.766.000	53.160.000		59.686.000		65.957.000		72.219.400		79.441.340		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.012.400,00		100.383.114,00		102.325.859,00		103.432.687,00		104.644.273,00	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	100.012.400,00	100	100.383.114,00	100	102.325.859,00	100	103.432.687,00	100	104.644.273,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					4.210.327.860,00		4.225.934.187,00		4.307.719.974,00		4.354.315.290,00		4.405.320.728,00	
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi dan produktivitas yang bekerja atau berwirausaha sesuai kompetensi (%)	56	58	60	4.210.327.860,00	62	4.225.934.187,00	64	4.307.719.974,00	66	4.354.315.290,00	68	4.405.320.728,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	5,88	5,92	5,96		6,00		6,03		6,07		6,11		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	601,06	643,07	683,82		724,57		765,33		806,08		846,83		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.775.618.680,00		1.782.200.325,00		1.816.691.789,00		1.836.342.400,00		1.857.852.889,00	
Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	47,11	43,26	43,58	1.775.618.680,00	43,89	1.782.200.325,00	44,33	1.816.691.789,00	44,67	1.836.342.400,00	45,09	1.857.852.889,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.172.813.675,00		1.177.160.917,00		1.199.942.869,00		1.212.922.292,00		1.227.130.182,00	
Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja	Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog Sosial dengan perusahaan (%)	66,52	67,46	68,42	1.172.813.675,00	69,28	1.177.160.917,00	70,14	1.199.942.869,00	71,06	1.212.922.292,00	72,08	1.227.130.182,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	18,76	23,76	28,76		33,76		38,76		43,76		48,76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	58,58	58,98	59,11		59,37		59,77		60,30		60,96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					2.858.031.200,00		2.868.624.999,00		2.924.142.370,00		2.955.771.941,00		2.990.395.168,00	
Meningkatnya kualitas pengawasan ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (%)	89,76	90,88	92	2.858.031.200,00	93	2.868.624.999,00	94	2.924.142.370,00	95	2.955.771.941,00	96	2.990.395.168,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan (%)	58,58	58,98	59,11		59,37		59,77		60,30		60,96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					372.766.000,00		374.147.723,00		381.388.717,00		385.514.086,00		390.029.908,00	
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					137.266.000,00		137.774.801,00		140.441.198,00		141.960.309,00		143.623.199,00	
Terwujudnya kawasan Transmigrasi yang berkembang	Jumlah Kabupaten yang diidentifikasi potensi kawasan transmigrasi (Kabupaten)	0	0	4	137.266.000,00	4	137.774.801,00	4	140.441.198,00	4	141.960.309,00	4	143.623.199,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					235.500.000,00		236.372.922,00		240.947.519,00		243.553.777,00		246.406.709,00	
Meningkatnya Sumber Daya di kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya (%)	100	100	100	235.500.000,00	100	236.372.922,00	100	240.947.519,00	100	243.553.777,00	100	246.406.709,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
TOTAL KESELURUHAN					63516366608.00		63751801280.00		64985609244.00		65688539103.00		66457999402.00	

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya perekonomian masyarakat desa - Menurunnya Pengangguran - Menurunnya kemiskinan 	Menurunnya kemiskinan dan pengangguran serta Terwujudnya Pengembangan di Kawasan Transmigrasi				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
					Persentase Penduduk Miskin (%)			
					Persentase peningkatan pendapatan perKapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi (%)			
					Meningkatnya kesempatan Kerja dan perlindungan tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
						persentase tenaga kerja terlindungi (%)		
					Terkelolanya informasi tenaga kerja	Meningkatnya Kualitas Data Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
							Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro (Orang)	2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
							Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro (Orang)	2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
		Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro (Orang)	2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					
		Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro (Orang)	2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja		Persentase lulusan pelatihan vokasi dan produktivitas yang bekerja atau berwirausaha sesuai kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
					Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
					Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Meningkatnya Lulusan Latihan Kerja Yang Bersertifikat	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja (Unit)	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2.07.03.1.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja (Unit)	2.07.03.1.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	
				Meningkatnya LPK Yang Terakreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK)	2.07.03.1.02 - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK)	2.07.03.1.02.0001 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	
				Meningkatnya Dokumen Konsultasi produktivitas	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.1.03 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	2.07.03.1.03.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	
				Meningkatnya Tingkat produktivitas Perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah (Dokumen)	2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah (Dokumen)	2.07.03.1.04.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Diberdayakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD (Orang)	2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Orang)	2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.1.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Orang)	2.07.04.1.01.0002 - Pelayanan Antar Kerja	
					Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Orang)	2.07.04.1.01.0004 - Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD (Orang)	2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
				Meningkatnya wirausaha baru	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Meningkatnya Angkatan Kerja Yang Bekerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Orang)	2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	2.07.04.1.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Orang)	2.07.04.1.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Meningkatnya pelayanan bagi PMI Pra Penempatan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.1.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	
					Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA (Orang)	2.07.04.1.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.1.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
					Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA (Orang)	2.07.04.1.04.0003 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya pelayanan bagi PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.1.04 - Pelindungan PM (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.1.04.0004 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
			Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja		Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog Sosial dengan perusahaan (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
					Persentase Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
					Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Meningkatnya Kelembagaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan)	2.07.05.1.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.1.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.1.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.1.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.1.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan)	2.07.05.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.1.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.1.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.1.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	
				Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Jumlah penetapan UMK (Surat Keputusan)	2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
					Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Orang)	2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
					Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	2.07.05.1.03.0001 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	
					Jumlah penetapan UMK (Surat Keputusan)	2.07.05.1.03.0003 - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Orang)	2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
			Meningkatnya kualitas pengawasan ketenagakerjaan		Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (%)	2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
					Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan (%)	2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	
				Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kerja	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	2.07.06.1.01.0001 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	
				Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	2.07.06.1.01.0003 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	
				Meningkatnya penyelesaian kasus melalui penegakan hukum ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	
					Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	2.07.06.1.01.0002 - Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	
		Meningkatnya Pengembangan masyarakat di kawasan transmigrasi			Persentase dukungan kegiatan Kementerian / Lembaga / Pemerintah / Daerah / Masyarakat / Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi (%)		
			Terwujudnya kawasan Transmigrasi yang berkembang		Jumlah Kabupaten yang diidentifikasi potensi kawasan transmigrasi (Kabupaten)	3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	
				Meningkatnya Desa Yang Diidentifikasi Menjadi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	3.32.02.1.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	3.32.02.1.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	
		Meningkatnya Sumber Daya di kawasan transmigrasi			Persentase Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya (%)	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	
			Meningkatnya pembinaan di kawasan transmigrasi		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.1.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	
					Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	3.32.04.1.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	3.32.04.1.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	
					Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	3.32.04.1.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Angka)		
					Jumlah inovasi yang diterapkan (Angka)		
					Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
			Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD		Persentase kegiatan tepat waktu (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BLUD (Angka)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Nilai Pendapatan Daerah BLUD (Rp)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Nilai pendapatan UPT (Rp)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Menyusun Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Disnakertran Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.07.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Menyusun Administrasi Keuangan Disnakertrans Prov Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	
						ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.07.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.07.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.07.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.07.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.07.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.07.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.07.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.07.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.07.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2.07.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.07.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.07.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Perusahaan Yang di Layani	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	2.07.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	2.07.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	5,88	5,92	5,96	6,00	6,03	6,07	6,11	
3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	47,11	43,26	43,58	43,89	44,33	44,67	45,09	
4	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan	%	58,58	58,98	59,11	59,37	59,77	60,30	60,96	
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	601,06	643,07	683,82	724,57	765,33	806,08	846,83	
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	58,58	58,98	59,11	59,37	59,77	60,30	60,96	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				63.143.600.608,00		63.377.653.557,00		64.604.220.527,00		65.303.025.017,00		66.067.969.494,00					
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				53.026.796.793,00		53.223.350.015,00		54.253.397.666,00		54.840.240.407,00		55.482.626.254,00					
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	-	100	53.026.796.793,00	100	53.223.350.015,00	100	54.253.397.666,00	100	54.840.240.407,00	100	55.482.626.254,00	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
	Persentase laporan/telaahan staf tepat waktu (%)	-	100		100		100		100		100			100	100	100	
	Nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal (Nilai)	-	100		100		100		100		100			100	100	100	
	Persentase Aduan/Keluhan Antar Bidang Terkait Layanan Sekretariat yang Ditindaklanjuti (%)	-	100		100		100		100		100			100	100	100	
	Persepsi Internal Antar Bidang/Unit Terhadap Layanan Sekretariat (%)	-	100		100		100		100		100			100	100	100	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan BLUD (Angka)	100	85		85		86		86		87			87			
	Nilai Pendapatan Daerah BLUD (Rp)	2.500.000.000	2.625.000. 000		2.750.000. 000		2.875.000. 000		3.000.000. 000		3.125.000.0 00						
	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan UPT (Angka)	88,4	90		92		95		95		96						
	Nilai pendapatan UPT (Rp)	105.766.000	53.160.000		59.686.000		65.957.000		72.219.400		79.441.340						
2.07.01.1.01 - Perencanaan, Pengganaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				743.211.825,00		743.211.825,00		743.211.825,00		743.211.825,00		743.211.825,00					
Menyusun Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Disnakertran Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	743.211.825,00	1	743.211.825,00	1	743.211.825,00	1	743.211.825,00	1	743.211.825,00					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4		4		4		4		4						
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1						
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1						
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15	15		15		15		15		15						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				601.274.900,00		601.274.900,00		601.274.900,00		601.274.900,00		601.274.900,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4	601.274.900,00	4	601.274.900,00	4	601.274.900,00	4	601.274.900,00	4	601.274.900,00		
2.07.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				13.427.400,00		13.427.400,00		13.427.400,00		13.427.400,00		13.427.400,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	13.427.400,00	1	13.427.400,00	1	13.427.400,00	1	13.427.400,00	1	13.427.400,00		
2.07.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.030.800,00		7.030.800,00		7.030.800,00		7.030.800,00		7.030.800,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.030.800,00	1	7.030.800,00	1	7.030.800,00	1	7.030.800,00	1	7.030.800,00		
2.07.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.272.000,00		2.272.000,00		2.272.000,00		2.272.000,00		2.272.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	2.272.000,00	1	2.272.000,00	1	2.272.000,00	1	2.272.000,00	1	2.272.000,00		
2.07.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				1.611.400,00		1.611.400,00		1.611.400,00		1.611.400,00		1.611.400,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	1.611.400,00	1	1.611.400,00	1	1.611.400,00	1	1.611.400,00	1	1.611.400,00		
2.07.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.322.000,00		24.322.000,00		24.322.000,00		24.322.000,00		24.322.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15	15	24.322.000,00	15	24.322.000,00	15	24.322.000,00	15	24.322.000,00	15	24.322.000,00		
2.07.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				51.563.425,00		51.563.425,00		51.563.425,00		51.563.425,00		51.563.425,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	1	51.563.425,00	1	51.563.425,00	1	51.563.425,00	1	51.563.425,00	1	51.563.425,00		
2.07.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				41.709.900,00		41.709.900,00		41.709.900,00		41.709.900,00		41.709.900,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	41.709.900,00	1	41.709.900,00	1	41.709.900,00	1	41.709.900,00	1	41.709.900,00		
2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				37.029.661.342,00		37.226.214.564,00		38.256.262.215,00		38.843.104.956,00		39.485.490.803,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				173.836.400,00		173.836.400,00		173.836.400,00		173.836.400,00		173.836.400,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	173.836.400,00	12	173.836.400,00	12	173.836.400,00	12	173.836.400,00	12	173.836.400,00		
2.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
2.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				41.408.800,00		41.408.800,00		41.408.800,00		41.408.800,00		41.408.800,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	41.408.800,00	12	41.408.800,00	12	41.408.800,00	12	41.408.800,00	12	41.408.800,00		
2.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				98.312.200,00		98.312.200,00		98.312.200,00		98.312.200,00		98.312.200,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	98.312.200,00	12	98.312.200,00	12	98.312.200,00	12	98.312.200,00	12	98.312.200,00		
2.07.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				31.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	31.200.000,00	12	31.200.000,00	12	31.200.000,00	12	31.200.000,00	12	31.200.000,00		
2.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.369.032.000,00		1.369.032.000,00		1.369.032.000,00		1.369.032.000,00		1.369.032.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	1.369.032.000,00	12	1.369.032.000,00	12	1.369.032.000,00	12	1.369.032.000,00	12	1.369.032.000,00		
2.07.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				90.698.500,00		90.698.500,00		90.698.500,00		90.698.500,00		90.698.500,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	90.698.500,00	1	90.698.500,00	1	90.698.500,00	1	90.698.500,00	1	90.698.500,00		
2.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.675.688.000,00		2.675.688.000,00		2.675.688.000,00		2.675.688.000,00		2.675.688.000,00		
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	44	261	2.675.688.000,00	390	2.675.688.000,00	334	2.675.688.000,00	377	2.675.688.000,00	558	2.675.688.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	110	295		405		441		752		695			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	38	8.500.000,00	42	8.500.000,00	42	8.500.000,00	46	8.500.000,00	50	8.500.000,00		
2.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				444.920.000,00		444.920.000,00		444.920.000,00		444.920.000,00		444.920.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	405	444.920.000,00	422	444.920.000,00	449	444.920.000,00	477	444.920.000,00	506	444.920.000,00		
2.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1.113.120.000,00		1.113.120.000,00		1.113.120.000,00		1.113.120.000,00		1.113.120.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	15	1.113.120.000,00	13	1.113.120.000,00	17	1.113.120.000,00	13	1.113.120.000,00	15	1.113.120.000,00		
2.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.610.000,00		15.610.000,00		15.610.000,00		15.610.000,00		15.610.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	15.610.000,00	4	15.610.000,00	5	15.610.000,00	5	15.610.000,00	5	15.610.000,00		
2.07.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	5	75.000.000,00	4	75.000.000,00	5	75.000.000,00	4	75.000.000,00	5	75.000.000,00		
2.07.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		
Meningkatnya Perusahaan Yang di Layani	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.625.000.000,00	1	2.625.000.000,00	1	2.625.000.000,00	2	2.625.000.000,00	2	2.625.000.000,00		
2.07.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.625.000.000,00	1	2.625.000.000,00	1	2.625.000.000,00	2	2.625.000.000,00	2	2.625.000.000,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				100.012.400,00		100.383.114,00		102.325.859,00		103.432.687,00		104.644.273,00		
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	100.012.400,00	100	100.383.114,00	100	102.325.859,00	100	103.432.687,00	100	104.644.273,00	2.07.3.32.0.00.01.00 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				100.012.400,00		100.383.114,00		102.325.859,00		103.432.687,00		104.644.273,00		
Meningkatnya Kualitas Data Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro (Orang)	0	0	100.012.400,00	13	100.383.114,00	13	102.325.859,00	13	103.432.687,00	13	104.644.273,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro (Orang)	0	0		39		39		39		39			
2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				100.012.400,00		55.000.000,00		56.942.745,00		58.049.573,00		59.261.159,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	1	100.012.400,00	1	55.000.000,00	1	56.942.745,00	1	58.049.573,00	1	59.261.159,00		
2.07.02.1.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0,00		22.383.114,00		22.383.114,00		22.383.114,00		22.383.114,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro (Orang)	0	0	0,00	39	22.383.114,00	39	22.383.114,00	39	22.383.114,00	39	22.383.114,00		
2.07.02.1.01.0004 - Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				0,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro (Orang)	0	0	0,00	13	23.000.000,00	13	23.000.000,00	13	23.000.000,00	13	23.000.000,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				4.210.327.860,00		4.225.934.187,00		4.307.719.974,00		4.354.315.290,00		4.405.320.728,00		
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi dan produktivitas yang bekerja atau berwirausaha sesuai kompetensi (%)	56	60	4.210.327.860,00	62	4.225.934.187,00	64	4.307.719.974,00	66	4.354.315.290,00	68	4.405.320.728,00	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	5,88	5,96		6,00		6,03		6,07		6,11			
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	601,06	683,82		724,57		765,33		806,08		846,83			
2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				4.012.327.860,00		3.952.934.187,00		4.034.719.974,00		4.081.315.290,00		4.132.320.728,00		
Meningkatnya Lulusan Latihan Kerja Yang Bersertifikat	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2	2	4.012.327.860,00	2	3.952.934.187,00	3	4.034.719.974,00	4	4.081.315.290,00	5	4.132.320.728,00		
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja (Unit)	59	373		95		12		84		91			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	404	502		576		650		724		798			
2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi				3.392.371.860,00		3.392.371.860,00		3.474.157.647,00		3.520.752.963,00		3.571.758.401,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	404	502	3.392.371.860,00	576	3.392.371.860,00	650	3.474.157.647,00	724	3.520.752.963,00	798	3.571.758.401,00		
2.07.03.1.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja				26.560.000,00		26.560.000,00		26.560.000,00		26.560.000,00		26.560.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2	2	26.560.000,00	2	26.560.000,00	3	26.560.000,00	4	26.560.000,00	5	26.560.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.03.1.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja				593.396.000,00		534.002.327,00		534.002.327,00		534.002.327,00		534.002.327,00		
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja (Unit)	59	373	593.396.000,00	95	534.002.327,00	12	534.002.327,00	84	534.002.327,00	91	534.002.327,00		
2.07.03.1.02 - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		
Meningkatnya LPK Yang Terakreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK)	10	12	103.000.000,00	12	103.000.000,00	13	103.000.000,00	13	103.000.000,00	13	103.000.000,00		
2.07.03.1.02.0001 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja				103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		
Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK)	10	12	103.000.000,00	12	103.000.000,00	13	103.000.000,00	13	103.000.000,00	13	103.000.000,00		
2.07.03.1.03 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya Dokumen Konsultasi produktivitas	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.07.03.1.03.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Meningkatnya Tingkat produktivitas Perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah (Dokumen)	2	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00		
2.07.03.1.04.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah (Dokumen)	2	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				1.775.618.680,00		1.782.200.325,00		1.816.691.789,00		1.836.342.400,00		1.857.852.889,00		
Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	47,11	43,58	1.775.618.680,00	43,89	1.782.200.325,00	44,33	1.816.691.789,00	44,67	1.836.342.400,00	45,09	1.857.852.889,00	2.07.3.32.0.00.01.00 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota				367.309.480,00		505.858.825,00		540.350.289,00		560.000.900,00		581.511.389,00		
Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Diberdayakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Orang)	0	0	0,00	40	138.549.345,00	40	138.549.345,00	40	138.549.345,00	40	138.549.345,00		
	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0	0		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0		30		30		30		30			
	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD (Orang)	0	0		5		5		5		5			
	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Orang)	0	0		8.357		8.457		8.557		8.657			
2.07.04.1.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				0,00		38.400.000,00		38.400.000,00		38.400.000,00		38.400.000,00		
Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0	0,00	30	38.400.000,00	30	38.400.000,00	30	38.400.000,00	30	38.400.000,00		
2.07.04.1.01.0002 - Pelayanan Antar Kerja				0,00		25.149.345,00		25.149.345,00		25.149.345,00		25.149.345,00		
Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Orang)	0	0	0,00	8.357	25.149.345,00	8.457	25.149.345,00	8.557	25.149.345,00	8.657	25.149.345,00		
2.07.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0	0	0,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00		
2.07.04.1.01.0004 - Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Orang)	0	0	0,00	40	35.000.000,00	40	35.000.000,00	40	35.000.000,00	40	35.000.000,00		
2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD (Orang)	0	0	0,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
Meningkatnya wirausaha baru	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	136	128	367.309.480,00	144	367.309.480,00	160	401.800.944,00	176	421.451.555,00	192	442.962.044,00		
2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				367.309.480,00		367.309.480,00		401.800.944,00		421.451.555,00		442.962.044,00		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	136	128	367.309.480,00	144	367.309.480,00	160	401.800.944,00	176	421.451.555,00	192	442.962.044,00		
2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				868.639.000,00		868.639.000,00		868.639.000,00		868.639.000,00		868.639.000,00		
Meningkatnya Angkatan Kerja Yang Bekerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	150	150	868.639.000,00	170	868.639.000,00	180	868.639.000,00	200	868.639.000,00	225	868.639.000,00		
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Orang)	6.495	5.350		5.400		5.450		5.500		5.550			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	656	200		300		400		450		500			
2.07.04.1.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				42.929.000,00		42.929.000,00		42.929.000,00		42.929.000,00		42.929.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	150	150	42.929.000,00	170	42.929.000,00	180	42.929.000,00	200	42.929.000,00	225	42.929.000,00		
2.07.04.1.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				490.660.500,00		490.660.500,00		490.660.500,00		490.660.500,00		490.660.500,00		
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Orang)	6.495	5.350	490.660.500,00	5.400	490.660.500,00	5.450	490.660.500,00	5.500	490.660.500,00	5.550	490.660.500,00		
2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				335.049.500,00		335.049.500,00		335.049.500,00		335.049.500,00		335.049.500,00		
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	656	200	335.049.500,00	300	335.049.500,00	400	335.049.500,00	450	335.049.500,00	500	335.049.500,00		
2.07.04.1.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				539.670.200,00		407.702.500,00		407.702.500,00		407.702.500,00		407.702.500,00		
Meningkatnya pelayanan bagi PMI Pra Penempatan	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA (Orang)	202	100	381.976.700,00	0	250.009.000,00	0	250.009.000,00	0	250.009.000,00	0	250.009.000,00		
	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	10		120		135		150		165			
2.07.04.1.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				250.009.000,00		250.009.000,00		250.009.000,00		250.009.000,00		250.009.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	10	250.009.000,00	120	250.009.000,00	135	250.009.000,00	150	250.009.000,00	165	250.009.000,00		
2.07.04.1.04.0003 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				131.967.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA (Orang)	202	100	131.967.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Meningkatnya pelayanan bagi PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	80	157.693.500,00	96	157.693.500,00	112	157.693.500,00	128	157.693.500,00	144	157.693.500,00		
2.07.04.1.04.0004 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				157.693.500,00		157.693.500,00		157.693.500,00		157.693.500,00		157.693.500,00		
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	80	157.693.500,00	96	157.693.500,00	112	157.693.500,00	128	157.693.500,00	144	157.693.500,00		
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				1.172.813.675,00		1.177.160.917,00		1.199.942.869,00		1.212.922.292,00		1.227.130.182,00		
Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja	Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog Sosial dengan perusahaan (%)	66,52	68,42	1.172.813.675,00	69,28	1.177.160.917,00	70,14	1.199.942.869,00	71,06	1.212.922.292,00	72,08	1.227.130.182,00	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	58,58	59,11		59,37		59,77		60,30		60,96			
	Persentase Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	18,76	28,76		33,76		38,76		43,76		48,76			
2.07.05.1.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota				249.999.650,00		249.999.650,00		249.999.650,00		249.999.650,00		249.999.650,00		
Meningkatnya Kelembagaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan)	1	1	249.999.650,00	1	249.999.650,00	1	249.999.650,00	1	249.999.650,00	1	249.999.650,00		
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online (Perusahaan)	10	10		11		12		13		14			
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	30	32		34		36		36		40			
2.07.05.1.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial				156.586.200,00		156.586.200,00		156.586.200,00		156.586.200,00		156.586.200,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	30	32	156.586.200,00	34	156.586.200,00	36	156.586.200,00	36	156.586.200,00	40	156.586.200,00		
2.07.05.1.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial				67.446.450,00		67.446.450,00		67.446.450,00		67.446.450,00		67.446.450,00		
Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online (Perusahaan)	10	10	67.446.450,00	11	67.446.450,00	12	67.446.450,00	13	67.446.450,00	14	67.446.450,00		
2.07.05.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				25.967.000,00		25.967.000,00		25.967.000,00		25.967.000,00		25.967.000,00		
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan)	1	1	25.967.000,00	1	25.967.000,00	1	25.967.000,00	1	25.967.000,00	1	25.967.000,00		
2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				299.999.800,00		304.347.042,00		304.347.042,00		304.347.042,00		304.347.042,00		
Meningkatnya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	30	35	299.999.800,00	40	304.347.042,00	45	304.347.042,00	50	304.347.042,00	55	304.347.042,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	40	45		50		55		60		65			
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	109	111		112		113		114		115			
2.07.05.1.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				37.445.200,00		41.792.442,00		41.792.442,00		41.792.442,00		41.792.442,00		
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	40	45	37.445.200,00	50	41.792.442,00	55	41.792.442,00	60	41.792.442,00	65	41.792.442,00		
2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				38.121.500,00		38.121.500,00		38.121.500,00		38.121.500,00		38.121.500,00		
Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	30	35	38.121.500,00	40	38.121.500,00	45	38.121.500,00	50	38.121.500,00	55	38.121.500,00		
2.07.05.1.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				119.120.500,00		119.120.500,00		119.120.500,00		119.120.500,00		119.120.500,00		
Terseleenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	109	111	119.120.500,00	112	119.120.500,00	113	119.120.500,00	114	119.120.500,00	115	119.120.500,00		
2.07.05.1.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi				105.312.600,00		105.312.600,00		105.312.600,00		105.312.600,00		105.312.600,00		
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	3	3	105.312.600,00	3	105.312.600,00	3	105.312.600,00	3	105.312.600,00	3	105.312.600,00		
2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				622.814.225,00		622.814.225,00		645.596.177,00		658.575.600,00		672.783.490,00		
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Orang)	2.000	2.100	622.814.225,00	2.200	622.814.225,00	2.300	645.596.177,00	2.400	658.575.600,00	2.500	672.783.490,00		
	Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah penetapan UMK (Surat Keputusan)	1	1		1		1		1		1			
2.07.05.1.03.0001 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)				248.275.200,00		248.275.200,00		271.057.152,00		284.036.575,00		298.244.465,00		
Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	1	1	248.275.200,00	1	248.275.200,00	1	271.057.152,00	1	284.036.575,00	1	298.244.465,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.05.1.03.0003 - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)				99.088.725,00		99.088.725,00		99.088.725,00		99.088.725,00		99.088.725,00		
Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK (Surat Keputusan)	1	1	99.088.725,00	1	99.088.725,00	1	99.088.725,00	1	99.088.725,00	1	99.088.725,00		
2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				275.450.300,00		275.450.300,00		275.450.300,00		275.450.300,00		275.450.300,00		
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Orang)	2.000	2.100	275.450.300,00	2.200	275.450.300,00	2.300	275.450.300,00	2.400	275.450.300,00	2.500	275.450.300,00		
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				2.858.031.200,00		2.868.624.999,00		2.924.142.370,00		2.955.771.941,00		2.990.395.168,00		
Meningkatnya kualitas pengawasan ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (%)	89,76	92	2.858.031.200,00	93	2.868.624.999,00	94	2.924.142.370,00	95	2.955.771.941,00	96	2.990.395.168,00	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan (%)	58,58	59,11		59,37		59,77		60,30		60,96			
2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				2.858.031.200,00		2.868.624.999,00		2.924.142.370,00		2.955.771.941,00		2.990.395.168,00		
Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kerja	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	754	808	760.042.400,00	862	765.042.400,00	916	790.042.400,00	970	821.671.971,00	1.024	856.295.198,00		
2.07.06.1.01.0001 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan				760.042.400,00		765.042.400,00		790.042.400,00		821.671.971,00		856.295.198,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	754	808	760.042.400,00	862	765.042.400,00	916	790.042.400,00	970	821.671.971,00	1.024	856.295.198,00		
Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	200	210	1.806.655.000,00	220	1.806.655.000,00	230	1.806.655.000,00	240	1.806.655.000,00	250	1.806.655.000,00		
2.07.06.1.01.0003 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan				1.806.655.000,00		1.806.655.000,00		1.806.655.000,00		1.806.655.000,00		1.806.655.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	200	210	1.806.655.000,00	220	1.806.655.000,00	230	1.806.655.000,00	240	1.806.655.000,00	250	1.806.655.000,00		
Meningkatnya penyelesaian kasus melalui penegakan hukum ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	33	45	291.333.800,00	49	296.927.599,00	54	327.444.970,00	54	327.444.970,00	53	327.444.970,00		
2.07.06.1.01.0002 - Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan				291.333.800,00		296.927.599,00		327.444.970,00		327.444.970,00		327.444.970,00		
Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	33	45	291.333.800,00	49	296.927.599,00	54	327.444.970,00	54	327.444.970,00	53	327.444.970,00		
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				372.766.000,00		374.147.723,00		381.388.717,00		385.514.086,00		390.029.908,00		
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI				137.266.000,00		137.774.801,00		140.441.198,00		141.960.309,00		143.623.199,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0		1		1		1		1		1				
2.07.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					601.274.900,00		601.274.900,00		601.274.900,00		601.274.900,00		601.274.900,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4	4	601.274.900,00	4	601.274.900,00	4	601.274.900,00	4	601.274.900,00	4	601.274.900,00			
2.07.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					13.427.400,00		13.427.400,00		13.427.400,00		13.427.400,00		13.427.400,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	13.427.400,00	1	13.427.400,00	1	13.427.400,00	1	13.427.400,00	1	13.427.400,00			
2.07.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					7.030.800,00		7.030.800,00		7.030.800,00		7.030.800,00		7.030.800,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	7.030.800,00	1	7.030.800,00	1	7.030.800,00	1	7.030.800,00	1	7.030.800,00			
2.07.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					2.272.000,00		2.272.000,00		2.272.000,00		2.272.000,00		2.272.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	1	2.272.000,00	1	2.272.000,00	1	2.272.000,00	1	2.272.000,00	1	2.272.000,00			
2.07.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					1.611.400,00		1.611.400,00		1.611.400,00		1.611.400,00		1.611.400,00		KALIMANTAN SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	1	1.611.400,00	1	1.611.400,00	1	1.611.400,00	1	1.611.400,00	1	1.611.400,00			
2.07.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24.322.000,00		24.322.000,00		24.322.000,00		24.322.000,00		24.322.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	15	15	15	24.322.000,00	15	24.322.000,00	15	24.322.000,00	15	24.322.000,00	15	24.322.000,00			
2.07.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					51.563.425,00		51.563.425,00		51.563.425,00		51.563.425,00		51.563.425,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0		1	51.563.425,00	1	51.563.425,00	1	51.563.425,00	1	51.563.425,00	1	51.563.425,00			
2.07.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					41.709.900,00		41.709.900,00		41.709.900,00		41.709.900,00		41.709.900,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	1	41.709.900,00	1	41.709.900,00	1	41.709.900,00	1	41.709.900,00	1	41.709.900,00			
2.07.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					37.029.661.342,00		37.226.214.564,00		38.256.262.215,00		38.843.104.956,00		39.485.490.803,00			
Menyusun Administrasi Keuangan Disnakertrans Prov Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60	60	60	37.029.661.342,00	60	37.226.214.564,00	60	38.256.262.215,00	60	38.843.104.956,00	60	39.485.490.803,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	200	200	210		220		220		220						
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	18		18		18		18						
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3		3		3		3						
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12		12		12		12						
2.07.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					35.224.336.742,00		35.420.889.964,00		36.450.937.615,00		37.037.780.356,00		37.680.166.203,00		KALIMANTAN SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	200	200	210	35.224.336.742,00	220	35.420.889.964,00	220	36.450.937.615,00	220	37.037.780.356,00	220	37.680.166.203,00			
2.07.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					982.919.000,00		982.919.000,00		982.919.000,00		982.919.000,00		982.919.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	982.919.000,00	12	982.919.000,00	12	982.919.000,00	12	982.919.000,00	12	982.919.000,00			
2.07.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					393.745.900,00		393.745.900,00		393.745.900,00		393.745.900,00		393.745.900,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	60	60	60	393.745.900,00	60	393.745.900,00	60	393.745.900,00	60	393.745.900,00	60	393.745.900,00			
2.07.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					42.176.500,00		42.176.500,00		42.176.500,00		42.176.500,00		42.176.500,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3	42.176.500,00	3	42.176.500,00	3	42.176.500,00	3	42.176.500,00	3	42.176.500,00			
2.07.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					386.483.200,00		386.483.200,00		386.483.200,00		386.483.200,00		386.483.200,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	18	386.483.200,00	18	386.483.200,00	18	386.483.200,00	18	386.483.200,00	18	386.483.200,00			
2.07.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					109.365.900,00		109.365.900,00		109.365.900,00		109.365.900,00		109.365.900,00			
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2	109.365.900,00	2	109.365.900,00	2	109.365.900,00	2	109.365.900,00	2	109.365.900,00			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	24		24		24		24						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					8.243.900,00		8.243.900,00		8.243.900,00		8.243.900,00		8.243.900,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	2	2	8.243.900,00	2	8.243.900,00	2	8.243.900,00	2	8.243.900,00	2	8.243.900,00			
2.07.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					47.584.000,00		47.584.000,00		47.584.000,00		47.584.000,00		47.584.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	12	47.584.000,00	12	47.584.000,00	12	47.584.000,00	12	47.584.000,00	12	47.584.000,00			
2.07.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					53.538.000,00		53.538.000,00		53.538.000,00		53.538.000,00		53.538.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	24	53.538.000,00	24	53.538.000,00	24	53.538.000,00	24	53.538.000,00	24	53.538.000,00			
2.07.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					797.850.000,00		797.850.000,00		797.850.000,00		797.850.000,00		797.850.000,00			
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	797.850.000,00	1	797.850.000,00	1	797.850.000,00	1	797.850.000,00	1	797.850.000,00			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	22	56		56		60		60		64				
	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	61	61	79		5		80		5		78				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60	77	204		206		215		212		216				
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
2.07.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					44.960.000,00		44.960.000,00		44.960.000,00		44.960.000,00		44.960.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	61	61	79	44.960.000,00	5	44.960.000,00	80	44.960.000,00	5	44.960.000,00	78	44.960.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN					
			2025	2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
2.07.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					142.846.000,00		142.846.000,00		142.846.000,00		142.846.000,00		142.846.000,00		KALIMANTAN SELATAN					
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	142.846.000,00	1	142.846.000,00	1	142.846.000,00	1	142.846.000,00	1	142.846.000,00							
2.07.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					9.722.000,00		9.722.000,00		9.722.000,00		9.722.000,00		9.722.000,00		KALIMANTAN SELATAN					
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	12	12	12	9.722.000,00	12	9.722.000,00	12	9.722.000,00	12	9.722.000,00	12	9.722.000,00							
2.07.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					335.646.000,00		335.646.000,00		335.646.000,00		335.646.000,00		335.646.000,00		KALIMANTAN SELATAN					
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22	22	56	335.646.000,00	56	335.646.000,00	60	335.646.000,00	60	335.646.000,00	64	335.646.000,00							
2.07.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					264.676.000,00		264.676.000,00		264.676.000,00		264.676.000,00		264.676.000,00		KALIMANTAN SELATAN					
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	60	77	204	264.676.000,00	206	264.676.000,00	215	264.676.000,00	212	264.676.000,00	216	264.676.000,00							
2.07.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.944.364.800,00		1.944.364.800,00		1.944.364.800,00		1.944.364.800,00		1.944.364.800,00							
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	1.944.364.800,00	12	1.944.364.800,00	12	1.944.364.800,00	12	1.944.364.800,00	12	1.944.364.800,00							
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1													1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12													12	12	12	12
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0													12	12	12	12
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12													12	12	12	12

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12		12		12		12		12				
2.07.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					139.876.900,00		139.876.900,00		139.876.900,00		139.876.900,00		139.876.900,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	139.876.900,00	12	139.876.900,00	12	139.876.900,00	12	139.876.900,00	12	139.876.900,00			
2.07.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					173.836.400,00		173.836.400,00		173.836.400,00		173.836.400,00		173.836.400,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	173.836.400,00	12	173.836.400,00	12	173.836.400,00	12	173.836.400,00	12	173.836.400,00			
2.07.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00			
2.07.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					41.408.800,00		41.408.800,00		41.408.800,00		41.408.800,00		41.408.800,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	12	41.408.800,00	12	41.408.800,00	12	41.408.800,00	12	41.408.800,00	12	41.408.800,00			
2.07.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					98.312.200,00		98.312.200,00		98.312.200,00		98.312.200,00		98.312.200,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	12	98.312.200,00	12	98.312.200,00	12	98.312.200,00	12	98.312.200,00	12	98.312.200,00			
2.07.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					31.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00		31.200.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	31.200.000,00	12	31.200.000,00	12	31.200.000,00	12	31.200.000,00	12	31.200.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1.369.032.000,00		1.369.032.000,00		1.369.032.000,00		1.369.032.000,00		1.369.032.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	1.369.032.000,00	12	1.369.032.000,00	12	1.369.032.000,00	12	1.369.032.000,00	12	1.369.032.000,00			
2.07.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					90.698.500,00		90.698.500,00		90.698.500,00		90.698.500,00		90.698.500,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	90.698.500,00	1	90.698.500,00	1	90.698.500,00	1	90.698.500,00	1	90.698.500,00			
2.07.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.675.688.000,00		2.675.688.000,00		2.675.688.000,00		2.675.688.000,00		2.675.688.000,00			
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	110	732	295	2.675.688.000,00	405	2.675.688.000,00	441	2.675.688.000,00	752	2.675.688.000,00	695	2.675.688.000,00			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	3		3		3		3		3				
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	44	165	261		390		334		377		558				
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0		0		0		0		0				
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
2.07.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
2.07.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					336.656.000,00		336.656.000,00		336.656.000,00		336.656.000,00		336.656.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	110	732	295	336.656.000,00	405	336.656.000,00	441	336.656.000,00	752	336.656.000,00	695	336.656.000,00			
2.07.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					2.104.520.000,00		2.104.520.000,00		2.104.520.000,00		2.104.520.000,00		2.104.520.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	44	165	261	2.104.520.000,00	390	2.104.520.000,00	334	2.104.520.000,00	377	2.104.520.000,00	558	2.104.520.000,00			
2.07.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					233.512.000,00		233.512.000,00		233.512.000,00		233.512.000,00		233.512.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	233.512.000,00	1	233.512.000,00	1	233.512.000,00	1	233.512.000,00	1	233.512.000,00			
2.07.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00			
2.07.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.314.897.826,00		4.314.897.826,00		4.314.897.826,00		4.314.897.826,00		4.314.897.826,00			
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	4.314.897.826,00	12	4.314.897.826,00	12	4.314.897.826,00	12	4.314.897.826,00	12	4.314.897.826,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12						
2.07.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					79.774.000,00		79.774.000,00		79.774.000,00		79.774.000,00		79.774.000,00		KALIMANTAN SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	79.774.000,00	12	79.774.000,00	12	79.774.000,00	12	79.774.000,00	12	79.774.000,00			
2.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					927.367.326,00		927.367.326,00		927.367.326,00		927.367.326,00		927.367.326,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	927.367.326,00	12	927.367.326,00	12	927.367.326,00	12	927.367.326,00	12	927.367.326,00			
2.07.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					14.116.000,00		14.116.000,00		14.116.000,00		14.116.000,00		14.116.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	14.116.000,00	12	14.116.000,00	12	14.116.000,00	12	14.116.000,00	12	14.116.000,00			
2.07.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					3.293.640.500,00		3.293.640.500,00		3.293.640.500,00		3.293.640.500,00		3.293.640.500,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	3.293.640.500,00	12	3.293.640.500,00	12	3.293.640.500,00	12	3.293.640.500,00	12	3.293.640.500,00			
2.07.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2.786.757.100,00		2.786.757.100,00		2.786.757.100,00		2.786.757.100,00		2.786.757.100,00			
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	368	405	2.786.757.100,00	422	2.786.757.100,00	449	2.786.757.100,00	477	2.786.757.100,00	506	2.786.757.100,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	43	5		4		5		5						
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1		1		1		1						
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	30	15		13		17		13						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	39	48		56		62		66						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	5		4		5		4		5				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	38		42		42		46		50				
2.07.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					77.124.000,00		77.124.000,00		77.124.000,00		77.124.000,00		77.124.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	1	77.124.000,00	1	77.124.000,00	1	77.124.000,00	1	77.124.000,00	1	77.124.000,00			
2.07.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.052.483.100,00		1.052.483.100,00		1.052.483.100,00		1.052.483.100,00		1.052.483.100,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	39	48	1.052.483.100,00	56	1.052.483.100,00	62	1.052.483.100,00	66	1.052.483.100,00	76	1.052.483.100,00			
2.07.01.1.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	38	8.500.000,00	42	8.500.000,00	42	8.500.000,00	46	8.500.000,00	50	8.500.000,00			
2.07.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					444.920.000,00		444.920.000,00		444.920.000,00		444.920.000,00		444.920.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75	368	405	444.920.000,00	422	444.920.000,00	449	444.920.000,00	477	444.920.000,00	506	444.920.000,00			
2.07.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					1.113.120.000,00		1.113.120.000,00		1.113.120.000,00		1.113.120.000,00		1.113.120.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	30	15	1.113.120.000,00	13	1.113.120.000,00	17	1.113.120.000,00	13	1.113.120.000,00	15	1.113.120.000,00			
2.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					15.610.000,00		15.610.000,00		15.610.000,00		15.610.000,00		15.610.000,00		KALIMANTAN SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	43	5	15.610.000,00	4	15.610.000,00	5	15.610.000,00	5	15.610.000,00	5	15.610.000,00			
2.07.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4	5	75.000.000,00	4	75.000.000,00	5	75.000.000,00	4	75.000.000,00	5	75.000.000,00			
2.07.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD					2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00			
Meningkatnya Perusahaan Yang di Layani	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1	2.625.000.000,00	1	2.625.000.000,00	1	2.625.000.000,00	2	2.625.000.000,00	2	2.625.000.000,00			
2.07.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		2.625.000.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1	2.625.000.000,00	1	2.625.000.000,00	1	2.625.000.000,00	2	2.625.000.000,00	2	2.625.000.000,00			
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.012.400,00		100.383.114,00		102.325.859,00		103.432.687,00		104.644.273,00			
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	100.012.400,00	100	100.383.114,00	100	102.325.859,00	100	103.432.687,00	100	104.644.273,00	2.07.3.32.0.00.01.00 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					100.012.400,00		100.383.114,00		102.325.859,00		103.432.687,00		104.644.273,00			
Meningkatnya Kualitas Data Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0	1	100.012.400,00	1	100.383.114,00	1	102.325.859,00	1	103.432.687,00	1	104.644.273,00			
	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro (Orang)	0	0	0		39		39		39		39				
	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro (Orang)	0	0	0		13		13		13		13				
2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					100.012.400,00		55.000.000,00		56.942.745,00		58.049.573,00		59.261.159,00		KALIMANTAN SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0	1	100.012.400,00	1	55.000.000,00	1	56.942.745,00	1	58.049.573,00	1	59.261.159,00			
2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro					0,00		22.383.114,00		22.383.114,00		22.383.114,00		22.383.114,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro (Orang)	0	0	0	0,00	39	22.383.114,00	39	22.383.114,00	39	22.383.114,00	39	22.383.114,00			
2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro					0,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro (Orang)	0	0	0	0,00	13	23.000.000,00	13	23.000.000,00	13	23.000.000,00	13	23.000.000,00			
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					4.210.327.860,00		4.225.934.187,00		4.307.719.974,00		4.354.315.290,00		4.405.320.728,00			
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi dan produktivitas yang bekerja atau berwirausaha sesuai kompetensi (%)	56	58	60	4.210.327.860,00	62	4.225.934.187,00	64	4.307.719.974,00	66	4.354.315.290,00	68	4.405.320.728,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	5,88	5,92	5,96		6,00		6,03		6,07		6,11				
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	601,06	643,07	683,82		724,57		765,33		806,08		846,83				
2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					4.012.327.860,00		3.952.934.187,00		4.034.719.974,00		4.081.315.290,00		4.132.320.728,00			
Meningkatnya Lulusan Latihan Kerja Yang Bersertifikat	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2	0	2	4.012.327.860,00	2	3.952.934.187,00	3	4.034.719.974,00	4	4.081.315.290,00	5	4.132.320.728,00			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	404	20	502		576		650		724		798				
	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja (Unit)	59	0	373		95		12		84		91				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi					3.392.371.860,00		3.392.371.860,00		3.474.157.647,00		3.520.752.963,00		3.571.758.401,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n (Orang)	404	20	502	3.392.371.860,00	576	3.392.371.860,00	650	3.474.157.647,00	724	3.520.752.963,00	798	3.571.758.401,00			
2.07.03.1.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja					26.560.000,00		26.560.000,00		26.560.000,00		26.560.000,00		26.560.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2	0	2	26.560.000,00	2	26.560.000,00	3	26.560.000,00	4	26.560.000,00	5	26.560.000,00			
2.07.03.1.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja					593.396.000,00		534.002.327,00		534.002.327,00		534.002.327,00		534.002.327,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja (Unit)	59	0	373	593.396.000,00	95	534.002.327,00	12	534.002.327,00	84	534.002.327,00	91	534.002.327,00			
2.07.03.1.02 - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja					103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00			
Meningkatnya LPK Yang Terakreditasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK)	10	10	12	103.000.000,00	12	103.000.000,00	13	103.000.000,00	13	103.000.000,00	13	103.000.000,00			
2.07.03.1.02.0001 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja					103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		103.000.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi (LPK)	10	10	12	103.000.000,00	12	103.000.000,00	13	103.000.000,00	13	103.000.000,00	13	103.000.000,00			
2.07.03.1.03 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah					0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00			
Meningkatnya Dokumen Konsultasi produktivitas	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			
2.07.03.1.03.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah					0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		KALIMANTAN SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	0	0	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00			
2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi					95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00			
Meningkatnya Tingkat produktivitas Perusahaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah (Dokumen)	2	1	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00			
2.07.03.1.04.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja					95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah (Dokumen)	2	1	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00			
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					1.775.618.680,00		1.782.200.325,00		1.816.691.789,00		1.836.342.400,00		1.857.852.889,00			
Meningkatnya penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	47,11	43,26	43,58	1.775.618.680,00	43,89	1.782.200.325,00	44,33	1.816.691.789,00	44,67	1.836.342.400,00	45,09	1.857.852.889,00	2.07.3.32.0.00.01.00 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2.07.04.1.01 - Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota					367.309.480,00		505.858.825,00		540.350.289,00		560.000.900,00		581.511.389,00			
Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Diberdayakan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Orang)	0	0	0	0,00	8.357	138.549.345,00	8.457	138.549.345,00	8.557	138.549.345,00	8.657	138.549.345,00			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Orang)	0	0	0		40		40		40		40				
	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0	0	0		100		100		100		100				
	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0	0		30		30		30		30				
	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD (Orang)	0	0	0		5		5		5		5				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.07.04.1.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja					0,00		38.400.000,00		38.400.000,00		38.400.000,00		38.400.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0	0	0,00	30	38.400.000,00	30	38.400.000,00	30	38.400.000,00	30	38.400.000,00			
2.07.04.1.01.0002 - Pelayanan Antar Kerja					0,00		25.149.345,00		25.149.345,00		25.149.345,00		25.149.345,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD (Orang)	0	0	0	0,00	8.357	25.149.345,00	8.457	25.149.345,00	8.557	25.149.345,00	8.657	25.149.345,00			
2.07.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja					0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	0	0	0	0,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00			
2.07.04.1.01.0004 - Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)					0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL (Orang)	0	0	0	0,00	40	35.000.000,00	40	35.000.000,00	40	35.000.000,00	40	35.000.000,00			
2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan					0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD (Orang)	0	0	0	0,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00			
Meningkatnya wirausaha baru	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	136	0	128	367.309.480,00	144	367.309.480,00	160	401.800.944,00	176	421.451.555,00	192	442.962.044,00			
2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja					367.309.480,00		367.309.480,00		401.800.944,00		421.451.555,00		442.962.044,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	136	0	128	367.309.480,00	144	367.309.480,00	160	401.800.944,00	176	421.451.555,00	192	442.962.044,00			
2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja					868.639.000,00		868.639.000,00		868.639.000,00		868.639.000,00		868.639.000,00			
Meningkatnya Angkatan Kerja Yang Bekerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	656	100	200	868.639.000,00	300	868.639.000,00	400	868.639.000,00	450	868.639.000,00	500	868.639.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Orang)	6.495	5.300	5.350		5.400		5.450		5.500		5.550				
	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	150	0	150		170		180		200		225				
2.07.04.1.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online					42.929.000,00		42.929.000,00		42.929.000,00		42.929.000,00		42.929.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	150	0	150	42.929.000,00	170	42.929.000,00	180	42.929.000,00	200	42.929.000,00	225	42.929.000,00			
2.07.04.1.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					490.660.500,00		490.660.500,00		490.660.500,00		490.660.500,00		490.660.500,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) (Orang)	6.495	5.300	5.350	490.660.500,00	5.400	490.660.500,00	5.450	490.660.500,00	5.500	490.660.500,00	5.550	490.660.500,00			
2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja					335.049.500,00		335.049.500,00		335.049.500,00		335.049.500,00		335.049.500,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	656	100	200	335.049.500,00	300	335.049.500,00	400	335.049.500,00	450	335.049.500,00	500	335.049.500,00			
2.07.04.1.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi					539.670.200,00		407.702.500,00		407.702.500,00		407.702.500,00		407.702.500,00			
Meningkatnya pelayanan bagi PMI Pra Penempatan	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0	10	381.976.700,00	120	250.009.000,00	135	250.009.000,00	150	250.009.000,00	165	250.009.000,00			
	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA (Orang)	202	91	100		0		0		0						
2.07.04.1.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)					250.009.000,00		250.009.000,00		250.009.000,00		250.009.000,00		250.009.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0	10	250.009.000,00	120	250.009.000,00	135	250.009.000,00	150	250.009.000,00	165	250.009.000,00			
2.07.04.1.04.0003 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran					131.967.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KALIMANTAN SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA (Orang)	202	91	100	131.967.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Meningkatnya pelayanan bagi PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	0	80	157.693.500,00	96	157.693.500,00	112	157.693.500,00	128	157.693.500,00	144	157.693.500,00				
2.07.04.1.04.0004 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan					157.693.500,00		157.693.500,00		157.693.500,00		157.693.500,00		157.693.500,00		KALIMANTAN SELATAN		
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	0	0	80	157.693.500,00	96	157.693.500,00	112	157.693.500,00	128	157.693.500,00	144	157.693.500,00				
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.172.813.675,00		1.177.160.917,00		1.199.942.869,00		1.212.922.292,00		1.227.130.182,00				
Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja	Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog Sosial dengan perusahaan (%)	66,52	67,46	68,42	1.172.813.675,00	69,28	1.177.160.917,00	70,14	1.199.942.869,00	71,06	1.212.922.292,00	72,08	1.227.130.182,00	2.07.3.32.0.00.01.00 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	Persentase Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	18,76	23,76	28,76		33,76		38,76		43,76		48,76					
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	58,58	58,98	59,11		59,37		59,77		60,30		60,96					
2.07.05.1.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota					249.999.650,00		249.999.650,00		249.999.650,00		249.999.650,00		249.999.650,00				
Meningkatnya Kelembagaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online (Perusahaan)	10	7	10	249.999.650,00	11	249.999.650,00	12	249.999.650,00	13	249.999.650,00	14	249.999.650,00				
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	30	30	32		34		36		36		40					
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
2.07.05.1.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial					156.586.200,00		156.586.200,00		156.586.200,00		156.586.200,00		156.586.200,00		KALIMANTAN SELATAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	30	30	32	156.586.200,00	34	156.586.200,00	36	156.586.200,00	36	156.586.200,00	40	156.586.200,00			
2.07.05.1.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial					67.446.450,00		67.446.450,00		67.446.450,00		67.446.450,00		67.446.450,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online (Perusahaan)	10	7	10	67.446.450,00	11	67.446.450,00	12	67.446.450,00	13	67.446.450,00	14	67.446.450,00			
2.07.05.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja					25.967.000,00		25.967.000,00		25.967.000,00		25.967.000,00		25.967.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek (Laporan)	1	1	1	25.967.000,00	1	25.967.000,00	1	25.967.000,00	1	25.967.000,00	1	25.967.000,00			
2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					299.999.800,00		304.347.042,00		304.347.042,00		304.347.042,00		304.347.042,00			
Meningkatnya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial melalui Perjanjian Bersama	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	3	3	3	299.999.800,00	3	304.347.042,00	3	304.347.042,00	3	304.347.042,00	3	304.347.042,00			
	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	40	40	45		50		55		60		65				
	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	30	30	35		40		45		50		55				
	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	109	110	111		112		113		114		115				
2.07.05.1.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					37.445.200,00		41.792.442,00		41.792.442,00		41.792.442,00		41.792.442,00		KALIMANTAN SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	40	40	45	37.445.200,00	50	41.792.442,00	55	41.792.442,00	60	41.792.442,00	65	41.792.442,00			
2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi					38.121.500,00		38.121.500,00		38.121.500,00		38.121.500,00		38.121.500,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	30	30	35	38.121.500,00	40	38.121.500,00	45	38.121.500,00	50	38.121.500,00	55	38.121.500,00			
2.07.05.1.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					119.120.500,00		119.120.500,00		119.120.500,00		119.120.500,00		119.120.500,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terseleenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	109	110	111	119.120.500,00	112	119.120.500,00	113	119.120.500,00	114	119.120.500,00	115	119.120.500,00			
2.07.05.1.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi					105.312.600,00		105.312.600,00		105.312.600,00		105.312.600,00		105.312.600,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	3	3	3	105.312.600,00	3	105.312.600,00	3	105.312.600,00	3	105.312.600,00	3	105.312.600,00			
2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)					622.814.225,00		622.814.225,00		645.596.177,00		658.575.600,00		672.783.490,00			
Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	1	1	1	622.814.225,00	1	622.814.225,00	1	645.596.177,00	1	658.575.600,00	1	672.783.490,00			
	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Orang)	2.000	2.000	2.100		2.200		2.300		2.400		2.500				
	Jumlah penetapan UMK (Surat Keputusan)	1	1	1		1		1		1		1				
2.07.05.1.03.0001 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)					248.275.200,00		248.275.200,00		271.057.152,00		284.036.575,00		298.244.465,00		KALIMANTAN SELATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP (Surat Keputusan)	1	1	1	248.275.200,00	1	248.275.200,00	1	271.057.152,00	1	284.036.575,00	1	298.244.465,00			
2.07.05.1.03.0003 - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)					99.088.725,00		99.088.725,00		99.088.725,00		99.088.725,00		99.088.725,00		KALIMANTAN SELATAN	
Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK (Surat Keputusan)	1	1	1	99.088.725,00	1	99.088.725,00	1	99.088.725,00	1	99.088.725,00	1	99.088.725,00			
2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					275.450.300,00		275.450.300,00		275.450.300,00		275.450.300,00		275.450.300,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Orang)	2.000	2.000	2.100	275.450.300,00	2.200	275.450.300,00	2.300	275.450.300,00	2.400	275.450.300,00	2.500	275.450.300,00			
2.07.06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					2.858.031.200,00		2.868.624.999,00		2.924.142.370,00		2.955.771.941,00		2.990.395.168,00			
Meningkatnya kualitas pengawasan ketenagakerjaan	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak-Hak Dasarnya (%)	89,76	90,88	92	2.858.031.200,00	93	2.868.624.999,00	94	2.924.142.370,00	95	2.955.771.941,00	96	2.990.395.168,00	2.07.3.32.0.00.01.00 00 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan (%)	58,58	58,98	59,11		59,37		59,77		60,30		60,96				
2.07.06.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan					2.858.031.200,00		2.868.624.999,00		2.924.142.370,00		2.955.771.941,00		2.990.395.168,00			
Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kerja	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	754	418	808	760.042.400,00	862	765.042.400,00	916	790.042.400,00	970	821.671.971,00	1.024	856.295.198,00			
2.07.06.1.01.0001 - Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan					760.042.400,00		765.042.400,00		790.042.400,00		821.671.971,00		856.295.198,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) (Perusahaan)	754	418	808	760.042.400,00	862	765.042.400,00	916	790.042.400,00	970	821.671.971,00	1.024	856.295.198,00			
Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	200	0	210	1.806.655.000,00	220	1.806.655.000,00	230	1.806.655.000,00	240	1.806.655.000,00	250	1.806.655.000,00			
2.07.06.1.01.0003 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan					1.806.655.000,00		1.806.655.000,00		1.806.655.000,00		1.806.655.000,00		1.806.655.000,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 (Perusahaan)	200	0	210	1.806.655.000,00	220	1.806.655.000,00	230	1.806.655.000,00	240	1.806.655.000,00	250	1.806.655.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya penyelesaian kasus melalui penegakan hukum ketenagakerjaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	33	20	45	291.333.800,00	49	296.927.599,00	54	327.444.970,00	54	327.444.970,00	53	327.444.970,00			
2.07.06.1.01.0002 - Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan					291.333.800,00		296.927.599,00		327.444.970,00		327.444.970,00		327.444.970,00		KALIMANTAN SELATAN	
Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan (Kasus)	33	20	45	291.333.800,00	49	296.927.599,00	54	327.444.970,00	54	327.444.970,00	53	327.444.970,00			
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					372.766.000,00		374.147.723,00		381.388.717,00		385.514.086,00		390.029.908,00			
3.32.02 - PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI					137.266.000,00		137.774.801,00		140.441.198,00		141.960.309,00		143.623.199,00			
Terwujudnya kawasan Transmigrasi yang berkembang	Jumlah Kabupaten yang diidentifikasi potensi kawasan transmigrasi (Kabupaten)	0	0	4	137.266.000,00	4	137.774.801,00	4	140.441.198,00	4	141.960.309,00	4	143.623.199,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3.32.02.1.01 - Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi					137.266.000,00		137.774.801,00		140.441.198,00		141.960.309,00		143.623.199,00			
Meningkatnya Desa Yang Diidentifikasi Menjadi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	1	1	1	137.266.000,00	1	137.774.801,00	1	140.441.198,00	1	141.960.309,00	1	143.623.199,00			
3.32.02.1.01.0001 - Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi					137.266.000,00		137.774.801,00		140.441.198,00		141.960.309,00		143.623.199,00		KALIMANTAN SELATAN	
Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	1	1	1	137.266.000,00	1	137.774.801,00	1	140.441.198,00	1	141.960.309,00	1	143.623.199,00			
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					235.500.000,00		236.372.922,00		240.947.519,00		243.553.777,00		246.406.709,00			
Meningkatnya Sumber Daya di kawasan transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya (%)	100	100	100	235.500.000,00	100	236.372.922,00	100	240.947.519,00	100	243.553.777,00	100	246.406.709,00	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3.32.04.1.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan					235.500.000,00		236.372.922,00		240.947.519,00		243.553.777,00		246.406.709,00			
Meningkatnya pembinaan di kawasan transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	60	30	120	135.500.000,00	120	136.372.922,00	120	140.947.519,00	120	143.553.777,00	120	146.406.709,00			
3.32.04.1.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman					135.500.000,00		136.372.922,00		140.947.519,00		143.553.777,00		146.406.709,00		KAB. TANAH BUMBU , KAB. BARITO KUALA , KAB. BALANGAN	
Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	60	30	120	135.500.000,00	120	136.372.922,00	120	140.947.519,00	120	143.553.777,00	120	146.406.709,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	2	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00			
3.32.04.1.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		KAB. BARITO KUALA , KAB. TANAH BUMBU , KAB. BALANGAN	
Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan (Satuan Permukiman)	2	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00			

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
1.	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	2.07.02.1.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
			2.07.02.1.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
			2.07.02.1.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
			2.07.02.1.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
2.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	2.07.03.1.01 - Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	
			2.07.03.1.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	
			2.07.03.1.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
			2.07.03.1.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	
			2.07.03.1.02 - Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	
			2.07.03.1.02.0001 - Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	
			2.07.03.1.03 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	
			2.07.03.1.03.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	
			2.07.03.1.04 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	
			2.07.03.1.04.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			3.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.04.1.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja				
2.07.04.1.01.0002 - Pelayanan Antar Kerja				
2.07.04.1.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				
2.07.04.1.01.0004 - Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)				
2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				
2.07.04.1.01.0006 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				
2.07.04.1.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
2.07.04.1.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				
2.07.04.1.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				
2.07.04.1.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				
2.07.04.1.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				
2.07.04.1.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				
2.07.04.1.04.0003 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran				
2.07.04.1.04.0004 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				
4.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja	2.07.05.1.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			2.07.05.1.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	
			2.07.05.1.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	
			2.07.05.1.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
			2.07.05.1.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.07.05.1.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.07.05.1.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	
			2.07.05.1.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	
			2.07.05.1.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	
			2.07.05.1.03 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	
			2.07.05.1.03.0001 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	
			2.07.05.1.03.0003 - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	
			2.07.05.1.03.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
5.	3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya Sumber Daya di kawasan transmigrasi	3.32.04.1.01 - Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	
			3.32.04.1.01.0001 - Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	
			3.32.04.1.01.0002 - Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI									
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,20	4,15	4,1	4,05	4	3,95	3,9	
3.	Persentase Penduduk Miskin	%	4,02	3,85	3,46	3,41	3,11	2,64	2,39	
4.	Persentase peningkatan pendapatan perKapita masyarakat di 45 Kawasan Transmigrasi	%	-	1,1	1,35	1,6	1,85	2,1	2,35	
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,22	70,45	70,68	70,91	71,14	71,37	71,60	
6.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	-	90,01	90,02	90,03	90,04	90,05	90,06	
7.	Persentase dukungan kegiatan Kementerian / Lembaga / Pemerintah / Daerah / Masyarakat / Badan Usaha yang dilaksanakan di 45 Kawasan Transmigrasi	%	-	40	42,5	45	47,5	50	52,5	
8.	persentase tenaga kerja terlindungi	%	12,25	12,31	12,37	12,43	12,49	12,55	12,68	
9.	Nilai Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Angka	-	95	95,1	95,2	95,3	95,4	95,5	
10.	Jumlah inovasi yang diterapkan	Angka	1	1	1	1	1	1	1	
11.	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Angka	-	3,00	3,09	3,18	3,30	3,45	3,60	
12.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	-	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan	positif	%	58,58	58,98	59,11	59,37	59,77	60,30	60,96	
3.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	positif	%	47,11	43,26	43,58	43,89	44,33	44,67	45,09	
5.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	positif	%	5,88	5,92	5,96	6,00	6,03	6,07	6,11	
6.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	601,06	643,07	683,82	724,57	765,33	806,08	846,83	
7.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	positif	%	58,58	58,98	59,11	59,37	59,77	60,30	60,96	

**POHON KINERJA SEKRETARIAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Sasaran Renstra

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah perangkat daerah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Sakip perangkat daerah 2. Nilai Kepuasan Masyarakat perangkat daerah (II) 3. Jumlah Inovasi yang diterapkan (II) 4. Nilai maturitas SPIP perangkat daerah 5. Indeks Pelayanan Publik (II)
1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta layanan UPT dan BLUD
<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase kegiatan tepat waktu 2. persentase laporan/teલાહાન staf tepat waktu 3. nilai kepatuhan pengelolaan administrasi internal 4. Persentase aduan / keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindaklanjuti 5. Persepsi internal antar bidang / unit terhadap layanan sekretariat 6. IKM Layanan BLUD 7. IKM Layanan UPT 8. Nilai Pendapatan Daerah BLUD 9. Nilai Pendapatan UPT
Prog : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Menyusun perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Disnakertrans Prov. Kalsel	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana, menyusun data kepegawaian dan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM						Meningkatnya perusahaan yang dilayani	Menyusun administrasi keuangan Disnakertrans Prov. Kalsel
1 Nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD	Persentase pemenuhan terkait spras dan kepegawaian disnakertrans prov kalsel						Persentase peningkatan pelayanan dan penunjang BLUD	1 Persentase Pemenuhan laporan keuangan Disnakertrans
Keg : Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keg : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Keg : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keg : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keg : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keg : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keg : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Keg : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
* Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	* Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Keg : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Keg : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sub Keg : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub Keg : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Keg : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Keg : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Keg : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Sub Keg : Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sub Keg : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Keg : Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sub Keg : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Keg : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Keg : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Keg : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Mebel	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	* Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sub Keg : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sub Keg : Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sub Keg : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Keg : Pengadaan Mebel	Sub Keg : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Keg : Pemeliharaan Mebel	Sub Keg : Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	* Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Sub Keg : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Keg : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Keg : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Keg : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	* Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
Sub Keg : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Sub Keg : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Keg : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Keg : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Keg : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Keg : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Keg : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Keg : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
* Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	* Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
Sub Keg : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Keg : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Keg : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Keg : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Keg : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Keg : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Keg : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Keg : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	* Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
Sub Keg : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Sub Keg : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Keg : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Keg : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Keg : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Keg : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Keg : Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Keg : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
* Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	* Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
Sub Keg : Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Sub Keg : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Keg : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Keg : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Keg : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Keg : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Keg : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Keg : Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	



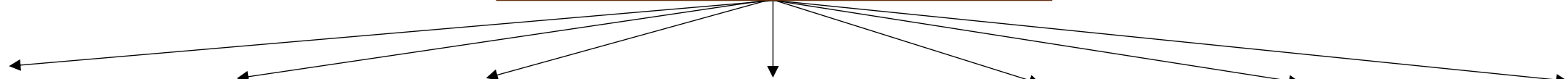
CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF)

Isu Strategis:

Kurangnya kesempatan kerja

Faktor Penyebab	Kondisi yang diperlukan
Kurangnya tenaga kerja yang diberdayakan Kurangnya angkatan kerja yang bekerja Kurangnya pelayanan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan) Kurangnya kompetensi tenaga kerja Kurangnya LPK yang terakreditasi Kurangnya tingkat produktivitas perusahaan Kurangnya perencanaan proyeksi tenaga kerja	Meningkatnya Tenaga Kerja yang diberdayakan Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja Meningkatnya pelayanan bagi PMI (Pra dan Purna Penempatan) Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Meningkatnya LPK yang terakreditasi Meningkatnya Tingkat Produktivitas Perusahaan Meningkatnya kualitas perencanaan ketenagakerjaan

Meningkatnya kesempatan kerja



Meningkatnya Tenaga Kerja yang diberdayakan

Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja

Meningkatnya pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

Meningkatnya LPK yang terakreditasi

Meningkatnya Tingkat Produktivitas Perusahaan

Meningkatnya kualitas perencanaan ketenagakerjaan

Critical Success Factor (CSF)	Kondisi yang diperlukan
Meningkatnya Tenaga Kerja yang diberdayakan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bimbingan teknis kompetensi kepada Pelayanan Antar Kerja - Memberikan bantuan sarana usaha untuk wirausaha baru. - Memberikan bantuan keterampilan untuk wirausaha baru.
Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online melalui pasar kerja online - Tersedianya data dan informasi pencari kerja yang memanfaatkan informasi pasar kerja online - Terlaksananya jobfair
Meningkatnya pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna Penempatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna Penempatan) berupa pelayanan untuk berangkat maupun kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah - Peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna
Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pelatihan Berbasis kompetensi bagi pencari kerja dan tenaga kerja
Meningkatnya LPK yang terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong sistem sertifikasi Lembaga Pelatihan Kerja
Meningkatnya Tingkat Produktivitas Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengukuran produktivitas pada perusahaan
Meningkatnya kualitas perencanaan ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan perencanaan tenaga kerja yang solutif

Meningkatnya kesempatan kerja

Meningkatnya Tenaga Kerja yang diberdayakan

- Memberikan bimbingan teknis kompetensi kepada Pelayanan Antar Kerja

- Memberikan bantuan sarana usaha untuk wirausaha baru.

- Memberikan bantuan keterampilan untuk wirausaha baru.

Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja

- Terselenggaranya pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online melalui pasar kerja online

- Tersedianya data dan informasi pencari kerja yang memanfaatkan informasi pasar kerja online

- Terlaksananya jobfair

Meningkatnya pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan)

- Peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

- Peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)

Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja

- Melaksanakan pelatihan Berbasis kompetensi bagi pencari kerja dan tenaga kerja

Meningkatnya LPK yang terakreditasi

- Mendorong sistem sertifikasi Lembaga Pelatihan Kerja

Meningkatnya Tingkat Produktivitas Perusahaan

- Melakukan pengukuran produktivitas pada perusahaan

Meningkatnya kualitas perencanaan ketenagakerjaan

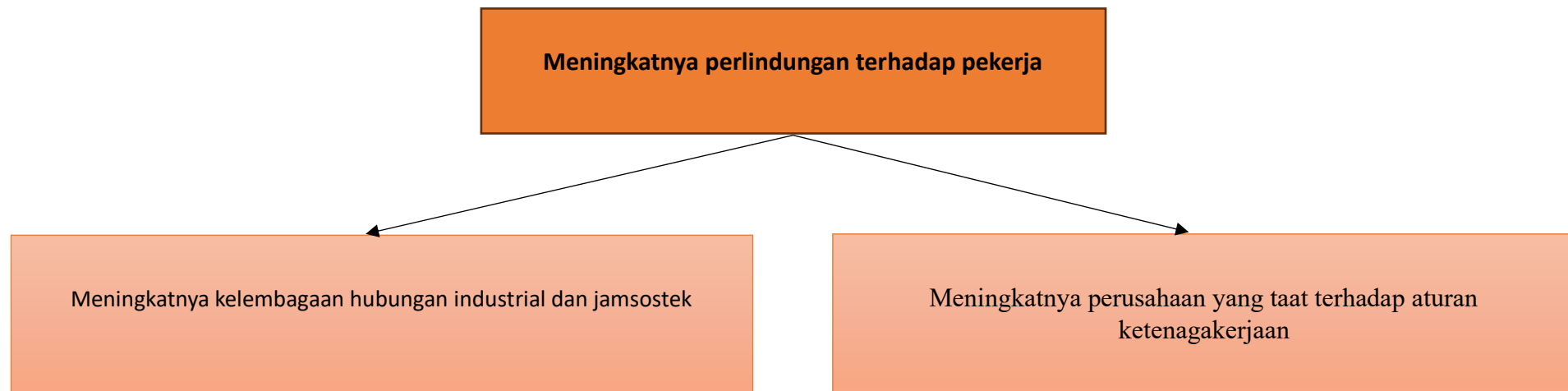
- Melakukan perencanaan tenaga kerja yang solutif

CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF)

Isu Strategis:

Kurangnya perlindungan terhadap pekerja

Faktor Penyebab	Kondisi yang diperlukan
Kurangnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan).	Meningkatnya kelembagaan hubungan industrial dan jamsostek
Kurangnya perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan ketenagakerjaan



Critical Success Factor (CSF)	Kondisi yang diperlukan
Meningkatnya kelembagaan hubungan industrial dan jamsostek	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai kebijakan dan prosedur perusahaan, termasuk tata tertib, prosedur penyelesaian perselisihan, dan hak-hak pekerja. - Menyusun dan mensosialisasikan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, termasuk mekanisme mediasi yang dapat membantu mengatasi perselisihan. - Menyusun SK UMP dan UMK sesuai dengan peraturan - Mendorong perusahaan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan - Tersedianya data perusahaan yang memiliki (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan).
Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan tenaga kerja di perusahaan mendapatkan hak norma kerja dan norma K3. <p>hak norma kerja (waktu kerja, waktu istirahat, sistem pengupahan, cuti kerja, pekerja/buruh perempuan, pekerja/buruh anak, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja, kesejahteraan, kesusilaan, diskriminasi, hubungan kerja, kebebasan berserikat, kesempatan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing masing) dan</p> <p>norma K3 (Penggunaan mesin, pesawat, alat - alat kerja, peralatan lainnya, bahan, lingkungan, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi dan pelayanan kesehatan kerja) menurut UU Permenaker RI No.33 tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>-</p>

Meningkatnya perlindungan terhadap pekerja

Meningkatnya kelembagaan hubungan industrial dan jamsostek

Meningkatnya perusahaan yang taat terhadap aturan ketenagakerjaan

- Melakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai kebijakan dan prosedur perusahaan, termasuk tata tertib, prosedur penyelesaian perselisihan, dan hak-hak pekerja

- Memastikan tenaga kerja di perusahaan mendapatkan hak norma kerja dan norma K3

- Menyusun dan mensosialisasikan prosedur penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, termasuk mekanisme mediasi yang dapat membantu mengatasi perselisihan

- Menyusun SK UMP dan UMK sesuai dengan peraturan

- Mendorong perusahaan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan

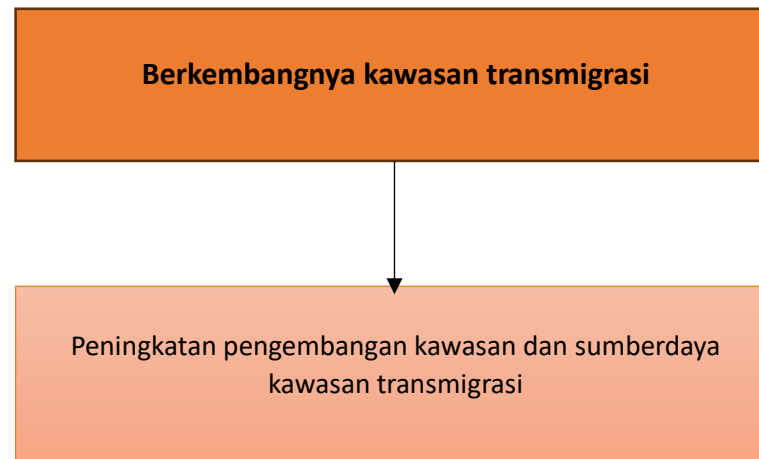
- Tersedianya data perusahaan yang memiliki (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)

CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF)

Isu Strategis:

Kurang berkembangnya kawasan transmigrasi

Faktor Penyebab	Kondisi yang diperlukan
Kurangunya pengembangan kawasan dan sumberdaya kawasan transmigrasi	Peningkatan pengembangan kawasan dan sumberdaya kawasan transmigrasi



Critical Success Factor (CSF)	Kondisi yang diperlukan
Peningkatan pengembangan kawasan dan sumberdaya kawasan transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Penguatan SDM di Kawasan transmigrasi - Melakukan penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di Kawasan transmigrasi

Berkembangnya kawasan transmigrasi

Peningkatan pengembangan kawasan dan sumberdaya kawasan transmigrasi

- Meningkatkan Penguatan SDM di Kawasan transmigrasi

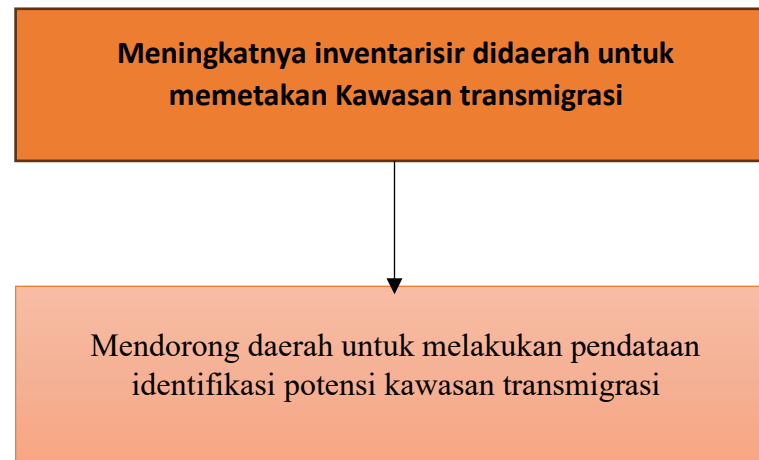
- Melakukan penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan di Kawasan transmigrasi

CRITICAL SUCCESS FACTOR (CSF)

Isu Strategis:

Kurangnya inventarisir didaerah untuk memetakan Kawasan transmigrasi

Faktor Penyebab	Kondisi yang diperlukan
Kurangnya identifikasi potensi kawasan transmigrasi	Mendorong daerah untuk melakukan pendataan identifikasi potensi kawasan transmigrasi



Critical Success Factor (CSF)	Kondisi yang diperlukan
Mendorong daerah untuk melakukan pendataan identifikasi potensi kawasan transmigrasi	- Teridentifikasi potensi Kawasan transmigrasi

Meningkatnya inventarisir didaerah untuk memetakan Kawasan transmigrasi

Mendorong daerah untuk melakukan pendataan identifikasi potensi kawasan transmigrasi

- Teridentifikasi potensi Kawasan transmigrasi

